BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CIANJUR

LAPORAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO

BPS Kabupaten Cianjur

2025



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CIANJUR

LAPORAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO

BPS Kabupaten Cianjur

2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Implementasi Manajemen Risiko BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penerapan manajemen risiko di lingkungan BPS Kabupaten Cianjur, sekaligus sebagai bagian dari upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tata kelola organisasi yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

Penerapan manajemen risiko merupakan instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui pengelolaan risiko yang terstruktur dan berkelanjutan, BPS Kabupaten Cianjur berupaya mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko strategis yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan manajemen risiko berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan pengambilan keputusan, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif dan berbasis risiko. Dengan penerapan manajemen risiko yang konsisten, BPS Kabupaten Cianjur diharapkan mampu memperkuat perencanaan pengawasan berbasis risiko, meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan manajemen risiko dan penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan pada periode berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, pengendalian intern, dan kinerja BPS Kabupaten Cianjur secara berkelanjutan.

Cianjur, Januari 2026
Kepala BPS Kabupaten Cianjur

Dadang Darmansyah

Daftar Isi

Kata Pengantar....3
Daftar Isi....4
BAB I PENDAHULUAN....5
1. **Latar Belakang....5**
2. **Dasar Hukum....5**
3. **Tujuan....6**
4. **Ruang Lingkup....6**
5. **Metodologi....6**
BAB II PROFIL BPS KOTA BEKASI....7
A. **Struktur Organisasi....7**
B. **Tugas dan Fungsi....7**
C. **Visi dan Misi....8**
D. **Tujuan dan Sasaran....8**
E. **Program dan Kegiatan....9**
BAB III PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO....11
A. **Penetapan Konteks Risiko....11**
B. **Penilaian Risiko....18**
C. **Penanganan Risiko....21**
D. **Pemantauan....25**
BAB IV PENUTUP....26
LAMPIRAN....27
Tabel 1 Identifikasi Risiko 2025....27

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan agenda nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, instansi pemerintah dituntut untuk mampu mengelola kinerja, risiko, dan pengendalian secara terintegrasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara berkelanjutan. Penguatan tata kelola tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan fungsi pengawasan intern yang profesional dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Oleh karena itu, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), termasuk manajemen risiko, menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi. Penerapan pengendalian intern dan manajemen risiko di lingkungan instansi pemerintah telah diamanatkan secara tegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan tersebut menegaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan pengendalian intern secara menyeluruh, yang mencakup proses penetapan tujuan, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, serta penetapan dan pemantauan pengendalian. Dalam kerangka SPIP, manajemen risiko diposisikan sebagai proses yang melekat pada seluruh aktivitas organisasi dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pimpinan dan pegawai, sehingga pengelolaan risiko tidak dipahami sebagai aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian organisasi secara keseluruhan.

Sejalan dengan penguatan pengendalian intern, penerapan manajemen risiko juga memiliki keterkaitan erat dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam kerangka SAKIP, pencapaian sasaran dan target kinerja instansi pemerintah tidak terlepas dari kemampuan organisasi dalam mengelola risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan kinerja. Manajemen risiko berperan dalam mengidentifikasi dan mengendalikan faktor-faktor ketidakpastian yang berpotensi menghambat pencapaian indikator kinerja, baik pada level organisasi maupun unit kerja. Dengan demikian, manajemen risiko mendukung kualitas perencanaan kinerja, proses cascading kinerja dari tingkat organisasi hingga individu, serta evaluasi kinerja yang lebih objektif dan berorientasi pada hasil. Selain itu, dengan penguatan kebijakan pengelolaan risiko pada level nasional, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Peraturan ini menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko secara terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dan program. MRPN mendorong instansi pemerintah untuk mengelola risiko secara proaktif dan sistematis guna meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan. Dalam konteks ini, penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) perlu diselaraskan dengan kebijakan manajemen

risiko pembangunan nasional, mengingat peran strategis BPS dalam mendukung perumusan dan evaluasi kebijakan berbasis data statistik.

BPS sebagai instansi pemerintah yang memiliki mandat strategis dalam penyediaan data statistik berkualitas menghadapi berbagai risiko yang bersumber dari dinamika lingkungan internal maupun eksternal. Risiko tersebut antara lain berkaitan dengan kualitas dan integritas data statistik, keberlanjutan proses statistik, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan sumber daya manusia, serta tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap data yang dihasilkan. Apabila risiko-risiko tersebut tidak dikelola secara memadai, maka dapat berdampak pada pencapaian sasaran strategis organisasi, kualita kinerja, serta kredibilitas BPS sebagai penyedia data statistik resmi. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko secara konsisten dan berkelanjutan menjadi kebutuhan strategis bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPS. Sebagai wujud komitmen organisasi dalam mengelola risiko secara sistematis, BPS telah menetapkan Buku Pedoman Implementasi Manajemen Risiko Badan Pusat Statistik Tahun 2022 sebagai acuan resmi penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja. Pedoman tersebut mengatur prinsip, proses, struktur, serta peran dan tanggung jawab pengelolaan risiko, sehingga memberikan keseragaman dan kejelasan dalam pelaksanaan manajemen risiko. Meskipun disusun pada tahun 2022, substansi dan kerangka kerja dalam pedoman tersebut masih relevan digunakan pada Tahun 2025 karena selaras dengan ketentuan SPIP, kebijakan MRPN, serta arah Reformasi Birokrasi yang menekankan penguatan tata kelola, pengendalian intern, dan akuntabilitas kinerja

BPS Kabupaten Cianjur adalah bagian dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkedudukan di Kabupaten Cianjur. Dalam melaksanakan tugas, BPS Kabupaten Cianjur menghadapi berbagai risiko, tugas, antara lain risiko dalam pengumpulan data, pengolahan data, diseminasi data serta evaluasi data. Risiko-risiko tersebut perlu dikelola secara sistematis agar tidak mengurangi efektivitas peran BPS Kabupaten Cianjur dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan kualitas kinerja. Implementasi Manajemen Risiko BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Manajemen Risiko BPS Tahun 2022, ketentuan SPIP, kebijakan MRPN, serta kebijakan peningkatan kapabilitas APIP. Proses manajemen risiko dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan pelaporan risiko. Penyusunan Laporan Implementasi Manajemen Risiko BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan risiko sekaligus sarana evaluasi untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko dalam mendukung penguatan SPIP, peningkatan kualitas SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan peningkatan kapabilitas APIP. Laporan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pimpinan dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pengendalian internal, serta mendorong terwujudnya fungsi

pengawasan intern yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pencegahan.

B. Tujuan dan Manfaat Laporan

Tujuan penilaian risiko di BPS Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan register dan peta risiko di BPS Kota Bekasi
2. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan penilaian risiko meliputi seluruh bagian maupun fungsi di lingkup BPS Kota Bekasi. Penilaian risiko ini juga meliputi seluruh kegiatan teknis maupun administrasi BPS Kota Bekasi.

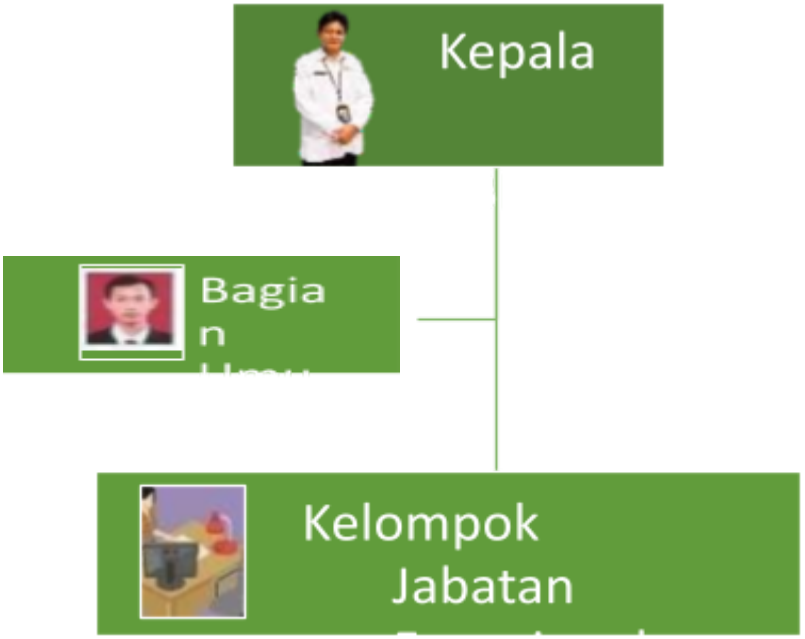
D. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko di BPS Kota Bekasi baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah *brainstorming* dan *Focus Group Disscussion* yang melibatkan seluruh Bagian dan Fungsi.

BAB II PROFIL BPS KOTA BEKASI

A. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan BPS No. 8 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Kota dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, struktur organisasi BPS Kota Bekasi terdiri atas Kepala, Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi BPS Kota Bekasi dapat digambarkan dengan bagan berikut:



B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 8 Tahun 2020, BPS Kota Bekasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kota Bekasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BPS Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan statistik dasar di Kota Bekasi
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Bekasi
3. Memperlancar dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kota Bekasi
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat,

hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kota.

C. Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden ,maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2025-2029 adalah “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” .Misi BPS Kota Bekasi dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS Kota Bekasi, visi BPS Kota Bekasi serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke- 2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

a) Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;
b) Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN); dan
c) Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

D. Tujuan dan Sasaran

Rumusan Tujuan BPS Kota Bekasi untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi pada tahun 2025-2029 adalah:

1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien; dan
3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu
3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional

E. Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS Kota Bekasi memiliki dua program yang terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program dukungan manajemen bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Program PPIS bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS Kota Bekasi secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal.

Kegiatan BPS Kota Bekasi terdiri dari:

1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan.
2. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan.
3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah.
4. Pengembangan dan Analisis Statistik.

5. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik.
6. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran.
7. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi.
8. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.
9. Pengembangan Sistem Informasi Statistik.
10. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi.
11. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga.
12. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi.
13. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
14. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat.
15. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial.
16. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata.
17. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.
18. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

BAB III PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Langkah kerja penilaian risiko merupakan penjelasan secara rinci atas prosedur penilaian risiko. Langkah kerja penilaian risiko terdiri atas penetapan konteks risiko, identifikasi risiko, dan analisis risiko.

A. Penetapan Konteks Risiko

Secara umum penetapan konteks risiko merupakan penjabaran sasaran satuan organisasi/unit kerja, serta hubungan satuan organisasi/unit kerja dengan lingkungan eksternal dan internal yang diproyeksi dapat menimbulkan risiko dan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sasaran satuan organisasi/unit kerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Perjanjian Kinerja (PK). Pelaksana penetapan konteks risiko adalah pimpinan satuan organisasi/unit kerja sebagai pemilik risiko.

Unit Organisasi : BPS Kota Bekasi

Ruang Lingkup Penerapan : - Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

- Penguatan statistik sektoral K/L/D/I
- Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
- SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam tata Kelola kelembagaan

Periode Penerapan : Tahun 2025

1. Sasaran Organisasi

No	Daftar Sasaran	Keterangan
1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	
2	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	
3	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	
4	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam tata Kelola kelembagaan	

2. Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko Pemilik Risiko

Pemilik Risiko : Kepala BPS Kota Bekasi

Pengelola Risiko : Kepala Bagian Umum

Periode Penerapan 2025

3. Daftar pemangku kepentingan (*stakeholder*)

No	*Stakeholder*	Hubungan
1	Sekretariat Daerah (SETDA)	Mitra Kerja Eksternal
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mitra Kerja Eksternal
3	Inspektorat (ITKO)	Mitra Kerja Eksternal
4	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	Mitra Kerja Eksternal
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Mitra Kerja Eksternal
6	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA)	Mitra Kerja Eksternal
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM)	Mitra Kerja Eksternal
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Mitra Kerja Eksternal
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (KESBANGPOL)	Mitra Kerja Eksternal
10	Dinas Kesehatan (DINKES)	Mitra Kerja Eksternal
11	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmadjid	Mitra Kerja Eksternal
12	Dinas Perhubungan (DISHUB)	Mitra Kerja Eksternal
13	Dinas Tata Ruang (DISTARU)	Mitra Kerja Eksternal
14	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	Mitra Kerja Eksternal
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Mitra Kerja Eksternal
16	Dinas Pendidikan (DISDIK)	Mitra Kerja Eksternal
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DISDAMKARMAT)	Mitra Kerja Eksternal
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)	Mitra Kerja Eksternal
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI)	Mitra Kerja Eksternal
20	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)	Mitra Kerja Eksternal
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN)	Mitra Kerja Eksternal
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DISARPUSDA)	Mitra Kerja Eksternal
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)	Mitra Kerja Eksternal
24	Dinas Pariwisata dan Budaya (DISPARBUD)	Mitra Kerja Eksternal
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN)	Mitra Kerja Eksternal
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM)	Mitra Kerja Eksternal
27	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)	Mitra Kerja Eksternal
28	Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER)	Mitra Kerja Eksternal

4. Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait

No	Peraturan	Amanat/Ketentuan
1	UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik	- Penyelenggaraan Statistik Dasar - Statistik sektoral diselenggarakan bersama Badan apabila diselenggarakan secara sensus dan jangkauan nasional - Sinopsis kegiatan statistik khusus harus diberitahukan kepada Badan - Mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakan dalam bentuk Berita Resmi Statistik - Bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat dalam membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran - Menjamin kerahasiaan keterangan responden - Bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam pembinaan penyelenggaraan kegiatan statistik
2	PP No. 51 Tahun 1999	- Menyelenggarakan Statistik Dasar melalui sensus, survei, kompromin, dan cara lain sesuai perkembangan iptek - Menetapkan wilayah pencacahan, dapat berupa bagian, seluruh, atau gabungan desa dan atau kelurahan, - Melakukan uji coba sensus - Menyelenggarakan survei antar sensus - Berhak memperoleh produk administrasi dari instansi pemerintah dan masyarakat - Menyajikan statistik dasar dalam bentuk agregasi dan bukan data individu - Menerima pemberitahuan rencana penyelenggaraan survei statistik sektoral, memberikan rekomendasi, menerima hasil penyelenggaraan survei sektoral - Melakukan pembinaan statistik, dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya - Sasaran pembinaan statistik mencakup penyelenggara kegiatan statistik, responden, dan pengguna statistik

3	Perka BPS No. 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah	- Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan survey, mengusulkan rancangan penyelenggaraan survei, kepada Kepala BPS jika cakupannya lebih dari 1 (satu) Kota, Kepala BPS Kota jika cakupannya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, Kepala BPS Kabupaten/Kota jika cakupannya hanya 1 kabupatan/kota, guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi - Sebelum memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, BPS, BPS Kota, atau BPS Kabupaten/Kota meneliti dan mengevaluasi rancangan penyelenggaraan survei yang diterima - Menyampaikan tembusan rekomendasi kepada instansi yang menangani bidang statistik pada Pemerintah Daerah bersangkutan - Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan survei dan hasilnya disebarluaskan atau hasilnya dapat

		dimanfaatkan oleh pihak lain, wajib menyerahkan hasilnya kepada BPS - Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPS dapat membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral - BPS melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan secara berkala - BPS melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Daearh Kabupaten/Kota atas penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral.
4	Perka BPS No. 16 Tahun 2011	- Melayani konsumen, informasi dan komunikasi, dengan berbagai media komunikasi - Melayani permintaan mikro data/*raw data*
5	Perka BPS No. 21 Tahun 2011	- Menerapkan Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
6	Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019	- Sebagai pembina data statistik di tingkat daerah dengan tugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah - Berkomunikasi pada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam menyelesaikan permasalahan - Melakukan pemeriksaan kembali atas pemeriksaan Data Prioritas yang diserahkan walidata -

8	Peraturan BPS No. 8 tahun 2020	- Menyelenggarakan statistik dasar di Kota - Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota - Memperlancar dan pembinaan terhadap instansi pemerintah di bidang kegiatan staistik di Kota - Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kota
8	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008	- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko

		- Menetapkan tujuan instansi pemerintah - Menentukan tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
9	Rencana Strategis Badan Pusat Statistik 2025-2029	- Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan; - Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN); dan - Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

5. Kriteria Risiko

Level Kriteria Kemungkinan

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
Hampir tidak terjadi (1)	X ≤ 5%	Sangat Jarang: < 2 kali dalam setahun
Jarang terjadi (2)	5% < X ≤ 10%	Jarang: 2 – 5 kali dalam setahun
Kadang terjadi (3)	10% < X ≤ 20%	Cukup Sering: 6-9 kali dalam setahun
Sering terjadi (4)	20% < X ≤ 50%	Sering: 10-12 kali dalam setahun
Hampir pasti terjadi (5)	X > 50%	Sangat Sering: > 12 kali setahun

Level Dampak Risiko

No	Area Dampak		Level	Level Dampak				
				Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Beban Keuangan Negara	Fraud	Lembaga	-	-	-	Rp100juta≤x<Rp1M	x≥1 M
			Es. I	-	-	-	Rp10jt≤x<Rp100jt	x≥Rp100jt
			Es. II	-	-	-	Rp1jt≤x<Rp10jt	x≥Rp10jt
		Non Fraud	Lembaga, Es. I, Es, II	0,01 permil ≥ x	0,01 permil <x≤0,1 permil	0,1 permil <x≤1 permil	1 permil <x≤10 permil	x>10 permil

2	Penurunan Reputasi	Lembaga	•Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat didokumen tasikan) / tertulis ke organisasi ≤ 10 • Tingkat kepercayaan stakeholder / investor sangat baik • Tingkat kepuasan Pengguna layanan sebesar 4,5 < x ≤ 5 (Skala 5)	•Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat didokumentasikan) / tertuliske organisasi ≤ 10 • Tingkat kepercayaan stakeholder/in vestor baik • Tingkat kepuasan Pengguna layanan sebesar4,5 < x ≤ 5 (Skala 5)	•Pemberitaan negatif di media sosial • Pemberitaan negatif di media massa lokal • Tingkatkepercayaan stakeholder/in vestor rendah • tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 4 < x ≤ 4,25 (skala 5)	•Pemberitaan negatif di media massa nasional dan Internasional • Tingkat kepercayaan stakeholder/in vestor rendah • Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar3,5 < x ≤ 4 (Skala 5)	•Tingkat kepercay aan stakehol der/ investor sangat rendah • Tingkat kepuasam penggun a layanan ≤ 3,5 (Skala 5)
		Es. II & III	• Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat	• Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat	• Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat	• Pemberitaan Negatif di media massa local	. Pemberitaan negatif di

			didokumentasikan) / tertulis ke organisasi ≤ 3 didokumentasikan) / tertulis ke organisasi ≤ 3 • Tingkat kepuasan Pengguna layanan sebesar 4,5 ≤ x ≤ 5 (Skala 5)	didokumentasikan) / tertulis ke organisasi 3 s.d. 5 • Tingkat kepuasan Pengguna layanan sebesar 4,25 < x ≤ 4,5 (Skala 5)	didokumentasikan) / tertulis ke organisasi > 5 • Pemberitaan negatif dimedia sosial yang sesuai fakta • Tingkat kepuasan Pengguna layanan sebesar 4,25 < x ≤ 4 (Skala 5)	• Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,5 < x ≤ 4 (Skala 5)	media massa nasional dan internasional Tingkat kepuasan penggun a layanan ≤ 3,5 (skala 5)
3	Sanksi Pidana, Perdata, dan/atau administrat i f	Lembaga	-	-	Administrat if: tergugat adalahPimp inan Eselon I, II, atau pejabat yang setara	Pidana: 4 < x ≤ 5 th Perdata: 75M < x ≤ 100M Administratif: Tergugat adalah menteri	Pidana > 5 th Perdata > 100M
		Es. II	-	-	Administrat i f: tergugat adalahPimp i nan Eselon II, Pejabat eselon III, atau pejabat yang setara	Pidana: 3 < x ≤ 4 th Perdata: 50M < x ≤ 75M Administratif: Tergugat adalah Pimpinan Eselon I	Pidana > 4 th Perdata > 75M

		Es. III	-	-	Administratif: tergugat adalahPejabat eselon III, IV atau pejabat yang setara	Pidana: 2 < x ≤ 3 th Perdata: 25M < x ≤ 50M Administratif: Tergugat adalah Pimpinan Eselon II	Pidana > 5 th Perdata > 50M
4	Kecelakaan Kerja	Lembaga, Es. I, Es. II	Ancaman Psikis	Cedera fisik dan mentalringan	Cedera fisik dan mental sedang	Cedera fisik dan mentalberat	Kematian

5	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Lembaga	x < 25% dari jam operasional layanan harian	25% < x ≤ 50% dari jam operasional layanan harian	50% < x ≤ 75% dari jam operasional layanan harian	75% < x ≤ 90% dari jam operasional layanan harian	x ≥ 90% dari jam operasional layanan harian
		Es. I	x < 15% dari jam operasional layanan harian	15% < x ≤ 40% dari jam operasional layanan harian	40% < x ≤ 65%dari jam operasional layanan harian	65% < x ≤ 80% dari jam operasional layanan harian	x ≥ 80% dari jam operasional layanan harian
		Es. II	x < 10% dari jam operasional layanan harian	10% < x ≤ 25% dari jam operasional layanan harian	25% < x ≤ 50% dari jam operasional layanan harian	50% < x ≤ 65% dari jam operasional layanan harian	x ≥ 65% dari jam operasional layanan harian

6. Matriks Analisis Risiko dan Level

Risiko Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko

Level Risiko		Besaran Risiko	Warna
1	Sangat Rendah (1)	1-5	Biru
2	Rendah (2)	6-10	Hijau
3	Sedang (3)	11-14	Kuning
4	Tinggi (4)	15-19	Oranye
5	Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah

7. Selera Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Tindakan Yang Diambil
Sangat Tinggi (5)	20-25	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko

Tinggi (4)	15-19	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sedang (3)	11-14	Diambil tindakan jika sumber daya tersedia
Rendah (2)	6-10	Diambil Tindakan jika diperlukan
Sangat Rendah (1)	1-5	Tidak diperlukan tindakan

B. Penilaian Risiko

Dari pernyataan risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan indikator sasaran pada perjanjian kinerja, BPS Kota Bekasi memiliki 146 risiko di semester 2, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Identifikasi Risiko

Bisnis Proses				Pernyataan Risiko		Penyebab Risiko		Risiko Aktual	
No	Tahapan Kegiatan	No	Uraian Kegiatan	No	Uraian	No	Uraian	Peluang	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko	1	10 - DOKUMEN RKA-KL	1	Ketidakselarasan antara anggaran dan kegiatan	1	Perubahan Rancangan kegiatan (terkait proses bisnis, asumsi dasar, jadwal, alokasi anggaran, dan target output) yang sangat dinamis	4	3
2	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko	2	10 - DOKUMEN RKA-KL	2	Anggaran di POK tidak mencukupi	2	Efisiensi anggaran	3	3
3	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	3	85 - PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	3	Kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan	3	Terlambatnya PJ beradaptasi tehadap perubahan berbagai aturan terkait pengelolaan keuangan	2	5
4	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	4	15 - GAJI DAN TUNJANGAN	4	Gangguan pada aplikasi dan atau prosedur setiap tahapan tidak dipatuhi sesuai yang telah ditetapkan	4	Gangguan pada aplikasi dan atau prosedur setiap tahapan tidak dipatuhi sesuai yang telah ditetapkan	2	3
5	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	5	15 - GAJI DAN TUNJANGAN	5	Gaji dan tunjangan tidak diterima sesuai hak pegawai	5	Kurangnya koordinasi antara tim kepegawaian dan pengelola gaji dan tunjangan tentang perubahan data kepegawaian	3	4
6	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	6	7 - DOKUMEN PERBENDAHARAAN : EVALUASI	6	Pada LHP APIP dan BPK terdapat temuan kesalahan administrasi	6	Kelengkapan dan kualitas administrasi belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan	3	4
7	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	7	8 - DOKUMEN PERBENDAHARAAN : PELAKSANAAN	7	Dokumen perbendaharaan tidak terarsipkan dengan baik	7	Belum adanya arsiparis di tim keuangan	4	4
8	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	8	32 - LAPORAN KEUANGAN	8	Kekurangan dokumen sumber, kesalahan perjurnalan dan penjelasan kurang memadai	8	Pemahaman penyusun LK, Ketelitian Penyusun LK	3	4

9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak	9	62 - LAYANAN REFORMASI BIROKRASI	9	Pegawai tidak memiliki komitmen yang sama untuk membangun zona integritas	9	Pemahaman dan kesadaran tentang pembangunan zona integritas masih rendah	3	4
10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak	10	62 - LAYANAN REFORMASI BIROKRASI	10	Pemenuhan bukti dukung tidak sesuai yang diminta oleh Tim Penilai	10	Bukti dukung yang diminta setiap tahun berbeda dan diberikan dalam waktu yang mendesak	3	4
11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak	11	62 - LAYANAN REFORMASI BIROKRASI	11	Pimpinan dan atau anggota tidak memahami pembangunan zona integritas yang berjalan	11	Pimpinan dan atau anggota baru mutasi masuk ke unit kerja	3	4
12	Terwujudnya Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan, dan Inovasi	12	47 - LAYANAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	12	Tidak bisa mengajukan ujian kompetensi	12	Tidak lulus ujian kompetensi	1	2
13	Terwujudnya Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan, dan Inovasi	13	36 - LAYANAN ADMINSTRASI PEGAWAI	13	Data kepegawaian tidak up to date	13	Tidak melaporkan perubahan data kepegawaian	2	2
14	Terwujudnya Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan, dan Inovasi	14	46 - LAYANAN MUTASI PEGAWAI	14	Terjadi mutasi pada pegawai BPS	14	Pegawai yang bertugas menjadi inda di mutasi ke satker lain	2	1
15	Terwujudnya Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan, dan Inovasi	15	80 - PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	15	Penyimpanan/pengarsipan dokumen tidak dilaksanakan dengan baik	15	Penataan alur dokumen tidak terencana dengan baik	3	2
16	Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisiensi Pengelolaan BMN	16	58 - LAYANAN PENGELOLAAN BMN	16	Risiko kehilangan atau kerusakan BMN	16	Tingkat pemahaman pengguna yang berbeda-beda	3	1
17	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	17	105 - PENGIRIMAN DAN PENCETAKAN DOKUMEN	17	Alokasi anggaran tidak efisien	17	belum jadinya bahan untuk dicetak	1	3
18	Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisiensi Pengelolaan BMN	18	152 - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 DAN RODA 2	18	Risiko kerusakan kendaraan akibat perawatan yang tidak tepat	18	Jadwal perawatan yang tidak teratur dan keterbatasan anggaran	2	2
19	Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima	19	39 - LAYANAN HUMAS	19	Tidak tersedianya penyimpanan file dokumentasi kegiatan organisasi	19	Keterbatasan alokasi anggaran untuk Layanan Kehumasan, termasuk pengadaan layanan penyimpanan file	4	4
20	Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima	20	39 - LAYANAN HUMAS	20	Terbatasnya aplikasi untuk membuat konten di media sosial	20	Keterbatasan alokasi anggaran untuk Layanan Kehumasan, termasuk pengadaan aplikasi pembuatan konten	4	4
21	Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima	21	36 - LAYANAN ADMINSTRASI PEGAWAI	21	Penyalahgunaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan	21	Pengelola kepegawaian tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku	3	4
22	Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima	22	32 - LAPORAN KEUANGAN	22	Pegawai yang melakukan perjalanan dinas tidak sesuai dengan hari yang tertera pada surat tugas	22	Pegawai memiliki kepentingan pribadi, sehingga memanfaatkan hari perjalanan dinas untuk melakukan kegiatan diluar kedinasan	4	3
23	Terwujudnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Desa untuk Menghasilkan Statistik Berkualitas	23	4 - DESA CANTIK	23	Pembinaan agen statistik tidak dapat dilaksanakan	23	Ada kegiatan atau jadwal lain yang dilakukan agen statistik	3	2
24	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	24	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	24	Calon Petugas kurang memahami konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	24	Pelatihan online dan waktu pelatihan singkat	3	4
25	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	25	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	25	Penolakan dari responden	25	Maksud dan tujuan pendataan BPS kurang dipahami masyarakat, masyarakat cenderung defensif terhadap pertanyaan tentang data pribadi	4	3

26	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	26	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	26	Petugas melakukan moral hazard dalam pengumpulan data, seperti mengisi data fiktif, tidak mengunjungi responden, atau manipulasi jawaban, dll	26	1. Pengawasan yang kurang maksimal. 2. Waktu penyelesaian pekerjaan singkat.	3	3
29	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	29	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	29	Masih terdapat anomali data hasil pencacahan lapangan	29	Kurang optimalnya pemeriksaan	4	3
30	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	30	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	30	Kurangnya kontrol kualitas data terkait kewajaran isian	30	Rule Validasi tidak dipasang secara ketat, masih ada rulval yang lolos	4	3
32	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	32	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	32	Penyelesaian pendataan terlambat dari jadwal yang telah ditentukan	32	Responden sulit ditemui	4	3
33	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	33	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	33	Server CAPI/Fasih maintanance	33	Server Pusat terkendala	3	3
36	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	36	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	36	Data Tidak Konsisten/kurang memenuhi tingkat kewajaran	36	Kurang optimalnya pemeriksaan	3	3
37	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	37	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	37	Kualitas data tidak sesuai harapan	37	Pengecekan indikator sementara kurang optimal	3	3
38	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	38	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	38	Kesalahan pengisian data oleh petugas	38	Petugas salah mengisi jawaban dari responden di kuesioner/CAPI	3	3
39	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	39	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	39	Isian tidak lengkap, tidak wajar, tidak konsisten	39	Petugas kurang probing	4	4
40	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	40	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	40	Calon Petugas kurang memahami konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	40	Pelatihan online dan waktu pelatihan singkat	3	4
41	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	41	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	41	Penolakan dari responden	41	Maksud dan tujuan pendataan BPS kurang dipahami masyarakat	4	3
42	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	42	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	42	Petugas melakukan pelanggaran SOP (Petugas melakukan moral hazard dalam pengumpulan data, seperti mengisi data fiktif, tidak mengunjungi responden,	42	1. Pengawasan yang kurang maksimal. 2. Waktu penyelesaian pekerjaan singkat.	3	3

					atau manipulasi jawaban)				
43	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	43	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	43	Kualitas pengawasan yang tidak optimal	43	Banyaknya kegiatan dalam waktu yang bersamaan	4	3
44	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	44	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	44	Responden tidak memahami maksud pertanyaan dalam kuesioner	44	Petugas membaca pertanyaan di kuesioner secara utuh tanpa memberikan penjelasan lebih	4	3
45	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	45	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	45	Masih terdapat anomali data hasil pencacahan lapangan	45	Kurang optimalnya pemeriksaan	4	3
46	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	46	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI) 024	46	Kurangnya kontrol kualitas data terkait kewajaran isian	46	Rule Validasi tidak dipasang secara ketat, masih ada rulval yang lolos	4	3
47	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	47	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	47	Penolakan Ketua SLS	47	1. Lurah tidak meneruskan informasi mengenai Kegiatan Statistik ke Ketua SLS 2.Kurangnya pemahaman ketua SLS terhadap kegiatan Statistik	4	3
48	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	48	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	48	Penyelesaian pendataan terlambat dari jadwal yang telah ditentukan	48	Responden sulit ditemui	4	3
49	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	49	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	49	Publikasi tidak selesai tepat waktu	49	Format penyajian dari pusat berkali-kali mengalami perubahan Waktu penyelesaian singkat	3	3
50	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	50	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	50	Kualitas data tidak sesuai harapan	50	Pengecekan indikator sementara kurang optimal	3	3
51	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	51	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	51	Kesalahan pengisian data oleh petugas	51	Petugas salah mengisi jawaban dari responden di kuesioner/CAPI	3	3
52	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	52	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	52	Moral hazard petugas pengolahan	52	Petugas salah mengisi jawaban dari responden di kuesioner/CAPI	2	4
53	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	53	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	53	Isian tidak lengkap, tidak wajar, tidak konsisten	53	Petugas kurang probing	4	4
54	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	54	170 - SURVEI HARGA KONSUMEN	54	Kualitas data tidak sesuai harapan	54	Kurangnya pengawasan dan supervisi dari proses entri data	3	3
55	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	55	170 - SURVEI HARGA KONSUMEN	55	Petugas pendataan kurang memahami konsep	55	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	4	3
56	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	56	23 - INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	56	data ekstrem	56	Petugas tidak cermat dalam memeriksa isian dokumen	4	3
57	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	57	171 - SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR	57	Kualitas data tidak sesuai harapan	57	Operator kurang teliti saat entry	4	3
58	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	58	190 - SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN	58	Ada kendala program pada saat entri hasil pendataan	58	Program entri belum optimal di awal tahun	4	3
59	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	59	190 - SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN	59	Perusahaan menolak untuk di cacah	59	Perusahaan lambat dalam mengisi data	4	3

60	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	60	185 - SURVEI POLA DISTRIBUSI BARANG	60	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	60	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	4	4
61	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	61	185 - SURVEI POLA DISTRIBUSI BARANG	61	Aplikasi pengolahan tidak tersedia tepat waktu	61	Hasil analisis data dan olah data terlambat	4	3
62	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	62	185 - SURVEI POLA DISTRIBUSI BARANG	62	Perusahaan menolak untuk di cacah	62	Perusahaan lambat dalam mengisi data	4	2
63	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	63	192 - SURVEI POLA USAHA NON PERTANIAN	63	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	63	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	4	4
64	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	64	192 - SURVEI POLA USAHA NON PERTANIAN	64	Aplikasi pengolahan tidak tersedia tepat waktu	64	Keterlambatan dalam proses sebelumnya	4	3
65	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	65	27 - KOMPILASI DATA STATISTIK JASA TRANSPORTASI	65	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	65	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	5	2
66	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	66	27 - KOMPILASI DATA STATISTIK JASA TRANSPORTASI	66	Bahan publisitas kiriman dari pusat atau provinsi datang terlambat	66	Hasil analisis data dan olah data terlambat	4	4
67	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	67	193 - SURVEI JASA PENUNJANG ANGKUTAN (PERGUDANGAN DAN KURIR)	67	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	67	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	3	4
68	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	68	193 - SURVEI JASA PENUNJANG ANGKUTAN (PERGUDANGAN DAN KURIR)	68	Aplikasi pengolahan tidak tersedia tepat waktu	68	Keterlambatan dalam proses sebelumnya	3	3
69	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	69	165 - STATISTIK LEMBAGA KEUANGAN	69	Petugas tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	69	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	3	3
70	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	70	165 - STATISTIK LEMBAGA KEUANGAN	70	Aplikasi pengolahan tidak tersedia tepat waktu	70	Keterlambatan dalam proses sebelumnya 4	3	3
71	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	71	188 - SURVEI STATISTIK BADAN USAHA DAN PASAR MODAL	71	Petugas tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	71	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	3	3
72	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	72	188 - SURVEI STATISTIK BADAN USAHA DAN PASAR MODAL	72	Aplikasi pengolahan tidak tersedia tepat waktu	72	Keterlambatan dalam proses sebelumnya	3	3
73	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Distribusi	73	224 - SENSUS EKONOMI 2026 (TAHAP PERSIAPAN)	73	Keterlambatan penyusunan strategi sosialisasi dan publisitas SE2026	73	Fokus yang terbagi dengan tugas lain dalam persiapan SE2026, sehingga strategi sosialisasi tidak menjadi prioritas utama.	4	3

74	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Distribusi	74	224 - SENSUS EKONOMI 2026 (TAHAP PERSIAPAN)	74	Anggaran publisitas SE2026 terbatas	74	Terbatasnya anggaran dilihat dari besarnya kegiatan dan luasnya jangkauan sasaran publisitas.	3	4
75	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Distribusi	75	224 - SENSUS EKONOMI 2026 (TAHAP PERSIAPAN)	75	Publisitas SE2026 kurang efektif dan efisien, tidak menjangkau seluruh pelaku usaha	75	Publisitas hanya menyentuh segmentasi tertentu saja 1.	4	4
76	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	76	224 - SENSUS EKONOMI 2026 (TAHAP PERSIAPAN)	76	Kualitas perlengkapan petugas buruk	76	Keterbatasan anggaran	4	3
77	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	77	169 - SURVEI USAHA JASA DAN PARIWISATA	77	Kualitas data tidak sesuai harapan	77	Kurangnya pengawasan proses entri FASIH harus dicek ke data entry LK	4	3
78	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	78	169 - SURVEI USAHA JASA DAN PARIWISATA	78	Petugas pendataan kurang memahami konsep	78	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	4	3
79	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	79	18 - IBS TAHUNAN	79	Pelatihan jarang sekali dilakukan, sangat dimungkinkan ada petugas baik lama maupun baru belum mendapatkan pelatihan	79	Ketersediaan anggaran pelatihan maupun briefing yang bisa dikatakan tidak ada.	3	3
80	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	80	LPTB	80	Petugas lupa terhadap konsep definisi dari isian kuesioner	80	karena tidak ada briefing sebelum pelaksanaan	3	3
81	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	81	89 - PENDATAAN STATISTIK PERTANIAN TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN METODE KERANGKA SAMPEL AREA	81	Pelatihan jarang sekali dilakukan, sangat dimungkinkan ada petugas baik lama maupun baru belum mendapatkan pelatihan	81	Ketersediaan anggaran.	4	3
82	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	82	17 - IBS BULANAN	82	Responden tidak bisa diwawancara langsung karena isian kuesioner harus antar bagian/ bidang dan petugas tidak bisa menemui semua bidang terkait	82	Kompleksitas isian/rincian pertanyaan.	3	3
83	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	83	179 - SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER DAN UPDATING DIREKTORI	83	Isian dokumen tidak lengkap dan atau non respon	83	Responden tidak mau memberikan data yang sifatnya rahasia usaha.	4	3
84	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	84	19 - IMK TAHUNAN	84	Responden tidak mengisi kuesioner secara lengkap dan konsistensi tidak terjaga	84	Keengganan responden dalam memberikan jawaban apa adanya secara lengkap, petugas pendata tidak memprobing ulang isian kuesioner yang telah diisi. -	4	3
85	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	85	20 - IMK TRIWULANAN	85	Petugas pengisi data perusahaan tidak paham dengan konsep dan definisi Kuesioner	85	Kurangnya penjelasan pengisian kuesioner kepada responden.	4	3
86	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	86	17 - IBS BULANAN	86	Responden tidak memiliki data sesuai dengan format kuesioner	86	Format laporan mengenai data di perusahaan tidak ada yang baku.	4	3
87	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	87	18 - IBS BULANAN	87	Responden memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pengisian kuesioner	87	Kesibukan responden dan kurang pengertiannya responden akan pentingnya data.	4	3
88	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	88	179 - SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER DAN UPDATING DIREKTORI	88	Perusahaan kurang jujur memberikan informasi	88	Kekhawatiran perusahaan akan penyalahgunaan data yang diberikan.	4	3
89	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	89	179 - SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER DAN UPDATING DIREKTORI	89	Sulitnya bertemu dengan responden	89	Kesibukan responden dan kurang pengertiannya responden akan pentingnya data.	4	3

90	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas	90	180 - SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN	90	Ada kemungkinan blok sensus yang potensial tidak tercover karena saat updating belum tanam	90	Kondisi alam dan kebiasaan responden.	4	3
91	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas	91	180 - SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN	91	Terlewatnya pelaksanaan ubinan	91	1. Kurangnya koordinasi dengan responden, 2. Waktu panen yang bisa bergeser.	3	3
92	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas	92	VN Horti dan VP Horti	92	Updating perusahaan hortikultura tidak berjalan baik	92	Tumpang tindih dengan kegiatan lainnya.	3	3
93	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	93	231 - SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR (STPIM)	93	Kuesioner hilang di responden	93	Kurang pedulinya responden.	3	3
94	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	94	STPIM - SKIM	94	Responden tidak memiliki data sesuai dengan format kuesioner	94	Format laporan mengenai data di perusahaan tidak ada yang baku.	3	3
95	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Peternakan Perikanan, Dan Kehutanan Yang Berkualitas	95	LTU dan LTT	95	Updating perusahaan peternakan tidak berjalan baik	95	Tumpang tindih dengan kegiatan lainnya.	3	3
96	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	96	20 - IMK TRIWULANAN	96	Peta BS yang digunakan adalah peta SE 2016, yang waktu nya sudah cukup lama, sehingga muatannya sudah tidak *update* dengan kondisi sekarang.	96	Frame survei masih mengacu pada kondisi 2016.	3	3
97	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	97	20 - IMK TRIWULANAN	97	Penulisan kegiatan usaha yang kurang jelas	97	Pemahaman petugas mengenai penjabaran kegiatan usaha.	4	3
98	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	98	176 - SURVEI KONSTRUKSI	98	Sulitnya mencari keberadaan perusahaan	98	Beberapa perusahaan tidak mencantumkan papan nama.	3	3
99	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	99	176 - SURVEI KONSTRUKSI	99	Banyak perusahaan hasil matching tidak ditemukan di alamat yang tertera di daftar sampel yang didapatkan di asosiasi dan unit pelayanan terpadu daerah serta	99	Alamat perusahaan hanya di tas, di lapangan hanya titip alamat.	4	3
100	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	100	176 - SURVEI KONSTRUKSI	100	Sulit mencari responden sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk survei konstruksi tahunan dan triwulanan.	100	Perusahaan dengan kualifikasi Menengah Besar masih sedikit.	3	3
101	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	101	176 - SURVEI KONSTRUKSI	101	Petugas kurang memahami tujuan dari kegiatan survei konstruksi.	101	Minimnya briefing petugas.	4	3
102	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	102	176 - SURVEI KONSTRUKSI	102	Perusahaan yang terkait tidak paham dengan cara/isian kuesioner	102	Form kuesioner tidak familiar di perusahaan.	4	3
103	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	103	231 - SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR (STPIM)	103	Sebagian responden ada yang menolak untuk diwawancarai	103	Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya data, responden seringkali disurvei dan tidak ada dampak langsungnya.	4	3
104	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	104	231 - SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR (STPIM)	104	Responden terindikasi menjawab sekenanya	104	Kebosanan responden.	4	3
105	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas	105	UPB UTL	105	Untuk pencacahan UPB UTL yang menggunakan moda CAPI, seringkali jawaban dari responden tidak konsisten.	105	Data yang tidak tercatat di responden.	3	3

106	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas	106	UPB UTL	106	Untuk pencacahan UPB UTL kadang-kadang responden meminta diberikan dokumen/ kuesioner hard copy untuk diisi sendiri.	106	Data yang tidak tercatat di responden.	3	3
107	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas	107	KSA dan Ubinan	107	ada kemungkinan sub segmen KSA tidak bisa dijangkau	107	terjadinya banjir karena curah hujan tinggi ataupun ditutupnya akses oleh pemilik lahan yang terkena sampel KSA, atau moral hazard petugas pencacah	3	3
108	Tersedianya Publikasi / Laporan Statistik Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	108	PENYUSUNAN PUBLIKASI PDRB INDONESIA TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA 2010 = 100	108	Publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha Triwulanan yang terbit tidak tepat waktu	108	1. Keterlambatan penerimaan data dari stakeholder 2. Beban kerja SDM yang tinggi menjelang publikasi	3	4
109	Tersedianya Publikasi / Laporan Statistik Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	109	143 - PENYUSUNAN PDB TAHUNAN DAN TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010 = 100	109	Data dasar dari lapangan usaha tidak lengkap atau terlambat masuk	109	1. Tim penyusun PDRB Lapangan usaha tidak bekerja tepat waktu 2. Stakeholder eksternal terlambat dalam memberikan data sekunder 3. Kesalahan pengiriman data saat rekonsiliasi dengan BPS Provinsi 4. Fenomena ekonomi yang dikumpulkan kurang lengkap	3	4
110	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Fungsi Nerwilis	110	233 - SURVEI KHUSUS NERACA PRODUKSI TAHUNAN (SKNP)	110	Respon Rate SKNP tidak sesuai target	110	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal	4	4
111	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Fungsi Nerwilis	111	137 - PENYUSUNAN NILAI TAMBAH LAPANGAN USAHA BARANG TRIWULANAN 2010 = 100 (SKTNP BARANG)	111	Respon Rate SKTNP barang tidak sesuai target	111	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal	3	4
112	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Fungsi Nerwilis	112	138 - PENYUSUNAN NILAI TAMBAH LAPANGAN USAHA JASA TRIWULANAN 2010 = 100 (SKTNP JASA)	112	Respon Rate SKTNP Jasa tidak sesuai target	112	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal	3	4
113	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Fungsi Nerwilis	113	PENDATAAN SURVEI PDAM	113	Pemasukan data PDAM tidak sesuai target	113	Stakeholder tidak memberikan data tepat waktu	4	4
114	Tersedianya Dokumen Administrasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Statistik Neraca Produksi yang sesuai pedoman dan tata aturan pemerintah	114	DOKUMEN ADMINISTRASI NERACA PRODUKSI	114	1. Keterlambatan pencairan honor. 2. Kesalahan perhitungan honor	114	1. Dokumen persyaratan kurang lengkap. 2. Kesalahan dalam membuat volume pekerjaan pada SPJ.	2	2
115	Tersedianya Publikasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yang dihasilkan yang bersumber dan aktivitas Statistik yang menerapkan Standard Akurasi	115	PENYUSUNAN PUBLIKASI STATISTIK DAERAH KOTA BEKASI	115	Publikasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yang dihasilkan yang bersumber dan aktivitas Statistik yang menerapkan Standard Akurasi tidak terbit tepat waktu	115	1. Tim penyusun publikasi tidak bekerja tepat waktu 2. Dukungan data dari external tidak tepat waktu	1	4
116	Tersedianya Rilis Data Nerwilis yang terbit tepat waktu	116	237 - DATA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	116	BRS IPM BPS Kota Bekasi tidak terbit tepat waktu	116	1. Tim penyusun berita resmi statistik tidak bekerja tepat waktu 2. Data final untuk bahan penyusun berita resmi statistik terlambat diterima dari BPS Provinsi	1	5

117	Tersedianya Upload BRS tepat waktu	117	237 - DATA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	117	Upload BRS IMP BPS Kota Bekasitidak tepat waktu	117	1. Tim penyusun berita resmi statistik tidak bekerja tepat waktu 2. Data final untuk bahan penyusun berita resmi statistik terlambat diterima dari BPS Provinsi	1	5

118	Tersedianya Publikasi dan Laporan Statistik Neraca Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan yang terbit tepat waktu	118	130 - PENYUSUNAN PDRB PENGELUARAN TRIWULANAN DAN TAHUNAN	118	Publikasi PDRB Menurut Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan tidak terbit tepat waktu	118	1. Tim penyusun PDRB Pengeluaran tidak bekerja tepat waktu 2. Terlambatnya stakeholder eksternal dalam memberikan data sekunder 3. Kesalahan pengiriman data saat rekonsiliasi dengan BPS Provinsi 4. Fenomena ekonomi yang dikumpulkan kurang lengkap	1	5
119	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Statistik Neraca Pengeluaran	119	SURVEI KHUSUS LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA TRIWULANAN (SKLNPT)	119	Respon rate SKLNPT tidak mencapai target	119	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal	3	4
120	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Statistik Neraca Pengeluaran	120	SURVEI KHUSUS PERUSAHAAN SWASTA NON FINANSIAL (SKPS)	120	Respon rate SKPS tidak mencapai target	120	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal	3	4
121	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Statistik Neraca Pengeluaran	121	SURVEI KHUSUS STUDI PENYUSUNAN PERUBAHAN INVENTORI (SKSPPI)	121	Respon rate SKSPPI tidak mencapai target	121	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal	3	4
122	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Statistik Neraca Pengeluaran	122	SURVEI KHUSUS STRUKTUR INPUT PEMERINTAH (SKSIP) BINAN	122	Respon rate SKSIP tidak mencapai target	122	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal	3	4
123	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Statistik Neraca Pengeluaran	123	SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	123	Respon rate PMTB tidak mencapai target	123	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal 1.	3	4
124	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Statistik Neraca Pengeluaran	124	SURVEI UPDATING DIREKTORI)	124	Respon rate Updating Direktori tidak mencapai target	124	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal .	3	4
125	Tersedianya Rilis Data Nerwilis yang terbit tepat waktu	125	PENYUSUNAN KEGIATAN SNAPSHOOT TRIWULANAN	125	Data PDRB Pengeluaran yang dihasilkan tidak berkualiitas	125	1. Minimnya berita mengenai fenomena ekonomi yang terjadi di wilayah Kota Bekasi 2. Tim pengumpul data snapshoot triwulanan tidak bekerja sesuai dengan jadwal	3	4
126	Tersedianya Dokumen Administrasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran yang sesuai pedoman dan tata aturan pemerintah	126	DOKUMEN ADMINISTRASI NERACA PENGELUARAN	126	1. Keterlambatan pencairan honor. 2. Kesalahan perhitungan honor	126	1. Dokumen persyaratan kurang lengkap. 2. Kesalahan dalam membuat volume pekerjaan pada SPJ.	2	2
127	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	127	94 - PENGEMBANGAN DESAIN SENSUS DAN SURVEI	127	Pemeriksaan pengajuan perubahan wilayah administrasi, masters BS dan SLS terlambat dilakukan	127	Kecamatan terlambat melaporkan perubahan SLS/BS pada aplikasi FRS .	3	4
128	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	128	94 - PENGEMBANGAN DESAIN SENSUS DAN SURVEI	128	Penyusunan publikasi tidak dapat diselesaikan tepat waktu	128	Tumpang tindih pekerjaan	2	4
129	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	129	197 - PEMUTAKHIRAN KERANGKA GEOSPASIAL DAN MUATAN WILKERSTAT	129	Progress monitoring tidak uptodate	129	Kecamatan tidak mengirimkan progress terbaru secara rutin	3	4
130	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	130	197 - PEMUTAKHIRAN KERANGKA GEOSPASIAL DAN MUATAN WILKERSTAT	130	Pengawasan ke Kecamatan tidak Maksimal	130	Anggaran Pengawasan ke Kecamatan minim	3	4

131	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	131	197 - PEMUTAKHIRAN KERANGKA GEOSPASIAL DAN MUATAN WILKERSTAT	131	Terdapat anomali data hasil pendataan muatan wilkerstat	131	Petugas kurang memahami konsep dan definisi .	4	5

132	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	132	197 - PEMUTAKHIRAN KERANGKA GEOSPASIAL DAN MUATAN WILKERSTAT	132	Adanya gap/overlap peta spasial yang dihasilkan	132	Kesalahan dalam melakukan digitasi batas wilayah kab/kec/desa/BS/SLS	4	5
133	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	133	197 - PEMUTAKHIRAN KERANGKA GEOSPASIAL DAN MUATAN WILKERSTAT	133	Peta Digital tidak dapat diupload	133	Server Geospasial System mengalami masalah	3	4
134	Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima	134	154 - PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI	134	Keterbatasan jaringan internet di kantor	134	Jaringan Internet bermasalah	2	5
135	Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima	135	154 - PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI	135	Keterbatasan jaringan internet di kantor .	135	Jaringan internet tidak stabil	2	5
136	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	136	239 - SUVEI KEBUTUHAN DATA (SKD)	136	SKD tidak rilis tepat waktu	136	Target Responden tidak tercapai	2	2
137	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerint a h Daerah	137	70 - PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL	137	Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Surat Rekomendasi harus menyerahkan hasil kegiatannya dalam bentuk softcopy sesuai UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	137	Keterbatasan Media Penyimpanan Dokumentasi Hasil Kegiatan Statistik Sektoral	2	2
138	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerint a h Daerah	138	Layanan Konsultasi Statistik	138	Pelayanan Konsultasi kepada Kelompok (Organisasi/Instansi/Perusaha an) dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan Aplikasi Ruang Meeting Virtual	138	Munculnya Aplikasi Ruang Meeting Virtual yang memungkinkan untuk digunakan dalam Pelayanan Konsultasi secara Grup/Kelompok	3	1
139	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	139	Layanan Konsultasi Statistik	139	Pengguna Layanan menyampaikan permintaan pelayanan diluar jam pelayanan	139	Permintaan pelayanan diajukan diluar jam pelayanan	4	2
140	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	140	Layanan Perpustakaan	140	Pengguna Layanan menganggap semua data tersedia di BPS	140	Pengguna Layanan menganggap semua data tersedia di BPS	4	3
141	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerint a h Daerah	141	Layanan Rekomendasi Statistik	141	Status Permintaan Layanan Rekomendasi Statistik tidak dapat berubah menjadi selesai karena tidak ada tindak lanjut dari pengguna layanan sampai batas waktu yang telah ditetapkan	141	Pemohon Rekomendasi Statistik tidak merespon tindak lanjut dari hasil pemeriksaaan rancangan kegiatan statistik sosial yang diajukan untuk mendapatkan Rekomendasi Kegiatan Statistik	4	2
142	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerint a h Daerah	142	Layanan Rekomendasi Statistik	142	Transfer pengetahuan dari Jawara Data yang lama kepada Jawara Data yang baru tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik bahkan ditengarai kerap tidak terjadi. Ini dapat berakibat pada bertambahnya waktu untuk penyusunan usulan rekomendasi kegiatan statistik perangkat daerah karena minimnya pengetahuan Jawara Data yang baru tersebut terkait penyusunan rekomendasi statistik.	142	Pergantian Jawara Data yang mengelola Kegiatan Statistik dan Data Statistik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat	2	2
143	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	143	Layanan Perpustakaan	143	Tidak tersedia penjelasan untuk setiap nilai yang digunakan pada skala nilai di SKD sehingga penilaian dapat menjadi bias atau miss interpretasi dan Nama survei yang dipakai untuk penilaian kepuasan adalah Survei Kebutuhan Data sehingga menimbulkan kesalahpahaman dari Pengguna Layanan	143	Keterbatasan pemahaman Pengguna Layanan dalam memberikan penilaian di Survei Kebutuhan Data	4	3

144	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	144	Layanan Perpustakaan	144	Pengguna Layanan Online tidak mendapatkan notifikasi untuk memberikan penilaian terhadap layanan yang telah diberikan	144	Pengguna Layanan Perpustakaan Online jarang yang memberikan penilaian SKD	2	2
145	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	145	Layanan Perpustakaan	145	Pengguna Layanan mengajukan Permintaan Produk Statistik melalui email/whatsapp untuk Produk Statistik yang telah tersedia pada situs resmi secara publik	145	Pengguna menginginkan layanan instan terutama untuk Layanan Permintaan Data	4	3
146	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	146	Layanan Perpustakaan	146	Publikasi dapat diakses secara online	146	Adanya Surat Edaran BPS tentang Peniadaan Pencetakan Publikasi	2	2

Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

C. Penanganan Risiko

Risiko yang muncul dalam penyelenggaraan kegiatan harus ditangani agar tujuan organisasi dapat tercapai. Berikut adalah penanganan risiko yang dilakukan di BPS Kota Bekasi:

Tabel 2 Rencana Tindak Pengendalian

No	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan				Risiko Residual Harapan		
		Rencana Tindak Penanganan Risiko (RTP)	Target Output	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	Level Kemungkinan	Level Dampak	Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ketidakselarasan antara anggaran dan kegiatan	Mengurangi jumlah revisi anggaran	Maksimal 1 kali revisi setiap bulannya	1 bulan sekali	Pejabat Pembuat Komitmen	2	2	7
2	Anggaran di POK tidak mencukupi	Mengoptimalkan anggaran yang ada sesuai dengan prioritas kegiatan	Semua kegiatan survei	1 tahun anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen	2	2	7
3	Kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan	Meningkatkan pemahaman pegawai, terutama PJ Kegiatan dan pengelola anggaran terhadap perubahan peraturan dan kelengkapan berkas administrasi	Pegawai, terutama PJ Kegiatan dan pengelola anggaran memahami dengan baik pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Setahun Sekali	Kasubbag Umum	1	1	1
4	Gangguan pada aplikasi dan atau prosedur setiap tahapan tidak dipatuhi sesuai yang telah ditetapkan	Monitoring secara berkala pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	Pegawai menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Setiap Bulan	Kasubbag Umum	1	1	1
5	Gaji dan tunjangan tidak diterima sesuai hak pegawai	Monitoring perubahan data kepegawaian terutama yang berkaitan langsung dengan gaji dan tunjangan	Pegawai menerima gaji dan tunjangan sesuai haknya	Setiap Bulan	Kasubbag Umum	1	2	3
6	Pada LHP APIP dan BPK terdapat temuan kesalahan administrasi Dokumen perbendaharaan tidak terarsipkan dengan baik	Mensosialisasikan secara berkala kelengkapan pertanggungjawaban anggaran	Pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang ditetapkan	Setiap Bulan	Kepala Bagian Umum	1	2	3
7	Dokumen perbendaharaan tidak terarsipkan dengan baik	Menyediakan arsiparis di tim keuangan	Tersedianya arsiparis di tim keuangan	1 Tahun	Kepala Bagian Umum	2	2	7
8	Kekurangan dokumen sumber, kesalahan perjurnalan dan penjelasan kurang memadai	Sosialisasi secara berkala tentang penyusunan LK	Pemahaman Tim Penyusun LK semakin baik	Setahun Sekali	Kepala Bagian Umum	1	2	3
9	Pegawai tidak memiliki komitmen yang sama untuk membangun zona integritas	1. Pimpinan menjadi role model dalam menguatkan komitmen 2. Sosialisasi penguatan komitmen dan pembangunan ZI	Pimpian dan seluruh pegawai memiliki komitmen yang sama kuat untuk mewujudkan WBBM	Semesteran	Kepala BPS Provinsi Jawa Barat	1	2	3
10	Pemenuhan bukti dukung tidak sesuai yang diminta oleh Tim Penilai	Mensosialisaskan tentang esensi dari bukti dukung yang diharapkan dari setiap indikator	bukti dukung tersedia sesuai esensi/substansi yang diminta pada setiap indikator	Triwulanan	Kepala BPS Provinsi Jawa Barat	1	2	3
11	Pimpinan dan atau anggota tidak memahami pembangunan zona integritas yang berjalan	Membriefing secara khusus tentang pembangunan ZI	Pegawai mutasi masuk memahami dengan baik pembangunan ZI yang berjalan	Semesteran	Kepala BPS Provinsi Jawa Barat	2	2	7
12	Tidak bisa mengajukan ujian kompetensi	Pengusulan uji kompetensi belum dilengkapi	Penyusunan SOP usulan Uji Kompetensi	Juli 2025	PJ SDM	1	2	3

13	Data kepegawaian tidak up to date	Menjelaskan panduan pengisian dengan jelas dan lengkap	Penyusunan tutorial pengisian data	July 2025	PJ SDM	1	3	5
14	Terjadi mutasi pada pegawai BPS	Pembagian beban tugas atau dibuatkan matriks kinerja	Peran setiap orang dan jabatan dalam satu kegiatan	Setiap bulan	PJ SDM	1	1	1
15	Penyimpanan/pengarsipan dokumen tidak dilaksanakan dengan baik	Penyusunan Kebijakan misalnya SOP, Buku Pedoman, dan lainnya	Penjelasan alur proses dokumen	July 2025	PJ SDM	3	1	4
16	Risiko kehilangan atau kerusakan BMN	Melakukan Sosialisasi	1. KAK kegiatan pengembangan SDM 2. Membuat tim kerja pelaksanaan kegiatan	Semesteran	Kepala BPS Provinsi Jawa Barat	2	1	2
17	Alokasi anggaran tidak efisien	Penyusunan SOP dalam setiap kegiatan baik Pengiriman maupun pengadaan	SOP Pengiriman Dokumen dan Pengadaan	setahun sekali	PJ. PBJ	1	4	8
18	Risiko kerusakan kendaraan akibat perawatan yang tidak tepat	- Penggunaan teknologi untuk memantau kondisi kendaraan - Pembuatan jadwal perawatan yang teratur - Penggunaan suku cadang yang asli dan berkualitas	Satu berkas KAK dan form permintaan	Triwulanan	PJ Umum	1	1	1
20	Terbatasnya aplikasi untuk membuat konten di media sosial	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan melampirkan alasan urgensi langganan aplikasi pembuatan konten	Satu berkas KAK dan form permintaan yang disusun dengan baik dan lengkap	Juli 2025	Tim Diseminasi	1	1	1
21	Penyalahgunaan pelaksanaan peraturan perundang- undangan	Penguatan prosedur, pengawasan atasan, dan penyusunan sistem terintegrasi	SOP yang sudah di buat dan di sepakati bersama	Setiap Kegiatan	PJ Umum	2	1	2
22	Pegawai yang melakukan perjalanan dinas tidak sesuai dengan hari yang tertera pada surat tugas	Membuat laporan perjalanan dinas dan dokumentasi foto setiap hari menggunakan open camera	Laporan Perjalanan yang Update dan ter-verifikasi	Setiap Selesai Kegiatan	PJ Umum	2	2	5
23	Pembinaan agen statistik tidak dapat dilaksanakan	Mengawal identifikasi awal dan monitoring pengecekan keberadaan/kontak person sesegera mungkin	Sampel ditemukan dan berstatus aktif	sebelum pelaksanaan pencacahan	Tim Desa Cantik	2	2	7
24	Calon Petugas kurang memahami konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	1. PML membuat laporan temuan hasil pengawasan secara berkala 2. Melaksanakan Rapat Evaluasi di periode awal pendataan -	Petugas memahami konsep dan definisi dengan Baik	Selama periode pelatihan dan pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1
25	Penolakan dari responden	Meningkatkan sosialisasi melalui: 1. pembuatan leaflet 2. sosialisasi melalui sosmed baik	Data terisi lengkap dan valid	Selama periode pelatihan dan pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	2	1	2

26	Petugas melakukan pelanggaran SOP (Petugas melakukan moral hazard dalam pengumpulan data, seperti mengisi data fiktif, tidak mengunjungi responden, atau manipulasi jawaban)	Membuat matriks jadwal pengawasan Uji petik untuk setiap petugas -	Data terisi lengkap dan valid	Selama periode pelatihan dan pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1
27	Kualitas pengawasan yang tidak optimal	1. Membuat Matriks Jadwal pengawasan lapangan yang ketat 2. Membuat laporan hasil pengawasan secara berkala sesuai jadwal pengawasan	Kegiatan tidak lagi tumpang tindih	Selama periode pelatihan dan pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1
28	Responden tidak memahami maksud pertanyaan dalam kuesioner	1. Mengefektifkan Sesi Roleplaying untuk berlatih wawancara 2. Pendampingan oleh PML di awal pendataan	Responden mengerti maksud setiap pertanyaan yang disampaikan petugas	Selama periode pelatihan dan pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	2	2	5
29	Masih terdapat anomali data hasil pencacahan lapangan	Monitoring dari BPS Provinsi melalui web monitoring	Data hasil entri clean 100% dan kondisi angka sesuai lapangan	1. 7 Agustus 2025 2. 14 Agustus 2025	Ketua Tim Statistik Sosial	2	2	7
30	Kurangnya kontrol kualitas data terkait kewajaran isian	Penambahan rule validasi berupa query tools 1.	1. Rule validasi yang telah diperiksa 2. Laporan yang disusun secara sistematis dan sesuai jadwal	sebelum periode pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1
31	Penolakan Ketua SLS	1. Koordinasi secara tertulis dan lisan dengan kelurahan dan ketua SLS 2. Sosialisasi lebih ditingkatkan baik melalui media online maupun offline (melalui Media Sosial maupun media offline)	respon rate tinggi	Selama periode pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1
32	Penyelesaian pendataan terlambat dari jadwal yang telah ditentukan	Membuat identifikasi awal untuk responden sulit ditemui dan menyusun strategi waktu kunjungan	Pendataan selesai sesuai jadwal	Selama periode pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1
33	Server CAPI/Fasih maintanance	1. Melakukan pendataan tidak menggunakan sinyal 2. Melakukan submit berkala pada jam tidak sibuk	Pendataan berjalan lancar	Selama periode pencacahan	SM Statistik Sosial dan PJK Pengolahan	1	1	1
34	Publikasi tidak selesai tepat waktu	Dibentuk Tim Penyusun Publikasi dalam setiap penyusunan publikasi	Publikasi tepat waktu	Sebelum dan selama periode pelaksanaan penyusunan Publikasi	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1
35	Permasalahan penggunaan aplikasi CAPI	Menghimbau petugas untuk secara berkala melakukan backup data	Hasil pendataan dapat terkirim	Selama periode pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	2	1	2

36	Data Tidak Konsisten/kurang memenuhi tingkat kewajaran	Melakukan rapat evaluasi	1. Jumlah laporan 2. Jumlah pertemuan rapat	Selama periode pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	2	2	7
37	Kualitas data tidak sesuai harapan	1. Memperbaiki isian yang tidak konsisten 2. Melakukan rapat evaluasi	1. Laporan yang disusun secara sistematis dan sesuai jadwal 2. Rapat evaluasi yang terlaksana sesuai jadwal	Sesuai Jadwal yang ditentukan	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1
38	Kesalahan pengisian data oleh petugas	1. Mengingatkan petugas agar benar pada saat klik jawaban 2. Pengawas melakukan uji petik pilihan jawaban	Data yang dihasilkan kerkualitas sesuai kondisi lapangan	Selama periode pencacahan	SM Statistik Sosial 1	1	1	1
39	Isian tidak lengkap, tidak wajar, tidak konsisten	1. Melakukan briefing lebih lebih lanjut di luar jadwal pelatihan 2. Memanfaatkan WA grup sebagai sarana tanya jawab dengan petugas dan menyampaikan penegasan - penegasan di lapangan	Petugas memahami konsep dan definisi dengan Baik	selama periode pelatihan dan pencacahan	Tim Statistik Sosial	2	2	7
40	Calon Petugas kurang memahami konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	1. PML membuat laporan temuan hasil pengawasan secara berkala 2. Melaksana kan Rapat Evaluasi di periode awal pendataan	Petugas memahami konsep dan definisi dengan Baik	Selama periode pelatihan dan pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1
41	Penolakan dari responden	Meningkatkan sosialisasi melalui: 1. pembuatan leaflet 2. sosialisasi melalui sosmed	Data terisi lengkap dan valid	Selama periode pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	2	1	2
42	Petugas melakukan pelanggaran SOP (Petugas melakukan moral hazard dalam pengumpulan data, seperti mengisi data fiktif, tidak mengunjungi responden, atau manipulasi jawaban)	Membuat matriks jadwal pengawasan Uji petik untuk setiap petugas	Data terisi lengkap dan valid	Selama periode pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1
43	Kualitas pengawasan yang tidak optimal	1. Membuat Matriks Jadwal pengawasan lapangan yang ketat 2. Membuat laporan hasil pengawasan secara berkala sesuai jadwal pengawasan	Kegiatan tidak lagi tumpang tindih	Selama periode pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1
44	Responden tidak memahami maksud pertanyaan dalam kuesioner	1. Mengefektifk an Sesi Roleplaying untuk berlatih wawancara 2. Pendampingan oleh PML di awal pendataan	Responden mengerti maksud setiap pertanyaan yang disampaikan petugas	Selama periode pelatihan	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1
45	Masih terdapat anomali data hasil pencacahan lapangan	Monitoring dari BPS Provinsi secara berkala sehingga data terbebas dari error dan anomali	Data hasil entri clean 100% dan kondisi angka sesuai lapangan	Selama Periode Pemeriksaan anomali	Ketua Tim Statistik Sosial	2	2	7
		1.	1.					
47	Penolakan Ketua SLS	1. Koordinasi secara tertulis dan lisan dengan kelurahan dan ketua SLS 2. Sosialisasi lebih ditingkatkan baik melalui media online maupun offline (melalui Media Sosial maupun media offline)	respon rate tinggi	sebelum periode pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1

48	Penyelesaian pendataan terlambat dari jadwal yang telah ditentukan	Membuat identifikasi awal untuk responden sulit ditemui dan menyusun strategi waktu kunjungan	Pendataan selesai sesuai jadwal	Selama periode pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1
49	Publikasi tidak selesai tepat waktu	Dibentuk Tim Penyusun Publikasi dalam setiap penyusunan publikasi	Publikasi tepat waktu	Sebelum dan selama periode pelaksanaan penyusunan Publikasi	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1
50	Kualitas data tidak sesuai harapan	1. Memperbaiki isian yang tidak konsisten 2. Melakukan rapat evaluasi	1. Laporan yang disusun secara sistematis dan sesuai jadwal 2. Rapat evaluasi yang terlaksana sesuai jadwal	Selama periode pencacahan	Ketua Tim Statistik Sosial	1	1	1
51	Kesalahan pengisian data oleh petugas	1. Mengingatkan petugas agar benar pada saat klik jawaban 2. Pengawas melakukan uji petik pilihan jawaban	Data yang dihasilkan kerkualitas sesuai kondisi lapangan	Selama periode pencacahan	SM Statistik Sosial	1	1	1
52	Moral hazard petugas pengolahan	1. Melakukan pengawasan pengolahan lebih intensif 2. Menyusun jadwal dan mekanisme uji petik yang akan dilaksanakan oleh pengawas pengolahan	Anomali data akibat kesalahan entri berkurang	Selama periode pengolahan	PJK Pengolahan	2	2	7
53	Isian tidak lengkap, tidak wajar, tidak konsisten	1. Melakukan briefing lebih lebih lanjut di lar jadwal pelatihan 2. Memanfaatkan WA grup sebagai sarana tanya jawab dengan petugas dan menyampaikan penegasan - penegasan di lapangan	Petugas memahami konsep dan definisi dengan Baik	selama periode pelatihan dan pencacahan	Tim Statistik Sosial	2	2	7
54	Kualitas data tidak sesuai harapan	Melakukan Monitoring kualitas	Perbandingan perubahan harga antar Kecamatan untuk setiap komoditas	Setiap bulan	Ketua Tim Statistik Harga	2	3	11
55	Petugas pendataan kurang memahami konsep	Melakukan briefing petugas sebelum dimulai pelaksanaan pendataan lapangan	Petugas survei harga konsumen yang telah dibriefing	Desember 2025	Ketua Tim Statistik Harga	2	3	11
56	data ekstrem	Melakukan Monitoring kualitas	Perbandingan harga antar Kecamatan untuk setiap komoditas dan kualitas	Setiap triwulan	Ketua Tim Statistik Harga	2	3	11
57	Kualitas data tidak sesuai harapan	Melakukan Monitoring kualitas	Perbandingan perubahan harga antar Kecamatan untuk setiap komoditas	Setiap bulan	Ketua Tim Statistik Distribusi	2	2	7
58	Ada kendala program pada saat entri hasil pendataan	Secara berkala menyampaikan dan menjalin komunikasi diskusi lewat WAG	Perbandingan perubahan harga setiap komoditas setiap bulannya	Setiap triwulan	Ketua Tim Statistik Harga	2	2	7
59	Perusahaan menolak untuk di cacah	Pendekatan yang baik ke pihak perusahaan dengan bersurat dan didampingi oleh Kepala BPS	Perbandingan perubahan harga antar Kecamatan untuk setiap komoditas	Setiap triwulan	Ketua Tim Statistik Harga	2	2	7
60	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	memberikan materi pembelajaran secara mandiri di WA Group	Kuesioner terisi dengan baik	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim Statistik Distribusi	1	4	8

61	Aplikasi pengolahan tidak tersedia tepat waktu	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara berjenjang	Data Terentri Sesuai Jadwal	Akhir Jadwal Pengolahan	Ketua Tim Statistik Distribusi	2	3	11
62	Perusahaan menolak untuk di cacah	Bekerja dengan lebih efektif dan menambah ekstra waktu di luar jam kerja	Publikasi	Sesuai ARC	Ketua Tim Statistik Distribusi	3	2	10
63	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	memberikan materi pembelajaran secara mandiri di WA Group	Kuesioner terisi dengan baik	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim Statistik Distribusi	1	4	8
64	Aplikasi pengolahan tidak tersedia tepat waktu	Menggunakan kuesioner kertas terlebih dahulu sembari menunggu program lancar	Data Terentri Sesuai Jadwal	Akhir Jadwal Pengolahan	Ketua Tim Statistik Distribusi	3	2	10
65	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	memberikan materi pembelajaran secara mandiri di WA Group	Kuesioner terisi dengan baik	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim Statistik Distribusi	3	2	10
66	Bahan publisitas kiriman dari pusat atau provinsi datang terlambat	Bekerja dengan lebih efektif dan menambah ekstra waktu di luar jam kerja	Publikasi	Sesuai ARC	Ketua Tim Statistik Distribusi	1	4	8
67	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	memberikan materi pembelajaran secara mandiri di WA Group	Kuesioner terisi dengan baik	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim Statistik Distribusi	1	4	8
68	Aplikasi pengolahan tidak tersedia tepat waktu	Menggunakan kuesioner kertas terlebih dahulu sembari menunggu program lancar	Data Terentri Sesuai Jadwal	Akhir Jadwal Pengolahan	Ketua Tim Statistik Distribusi	3	2	10
69	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	memberikan materi pembelajaran secara mandiri di WA Group	Kuesioner terisi dengan baik	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim Statistik Distribusi	2	3	11
70	Aplikasi pengolahan tidak tersedia tepat waktu	Menggunakan kuesioner kertas terlebih dahulu sembari menunggu program lancar	Data Terentri Sesuai Jadwal	Akhir Jadwal Pengolahan	Ketua Tim Statistik Distribusi	3	2	10
71	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	memberikan materi pembelajaran secara mandiri di WA Group	Kuesioner terisi dengan baik	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim Statistik Distribusi	2	3	11

72	Aplikasi pengolahan tidak tersedia tepat waktu	Menggunakan kuesioner kertas terlebih dahulu sembari menunggu program lancar	Data Terentri Sesuai Jadwal	Akhir Jadwal Pengolahan	Ketua Tim Statistik Distribusi	3	2	10
73	Keterlambatan penyusunan strategi sosialisasi dan publisitas SE2026	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi pelaksanaan rencana kerja/strategi sosialisasi dan publisitas SE2026	Data Terentri Sesuai Jadwal	Akhir bulan	Ketua Tim Sensus Ekonomi	2	3	11
74	Anggaran publisitas SE2026 terbatas	Melakukan optimalisasi penggunaan anggaran dengan pemilihan media sosialisasi yang efektif dan kolaborasi dengan stakeholder untuk mendukung publisitas SE2026	media sosialisasi	Akhir Tahun Anggaran	Ketua Tim Sensus Ekonomi	2	3	11
75	Publisitas SE2026 kurang efektif dan efisien, tidak menjangkau seluruh pelaku usaha	Melakukan diversifikasi media dan metode sosialisasi serta peningkatan kerja sama dengan stakeholder untuk memperluas jangkauan publisitas SE2026. .	media sosialisasi	Akhir Tahun Anggaran	Ketua Tim Sensus Ekonomi	2	3	11
76	Kualitas perlengkapan petugas buruk	Membekali petugas dengan surat tugas dan tanda pengenal serta ijin ke pemangku wilayah sebelum kelapangan	perlengkapan tanda pengenal	Akhir Tahun Anggaran	Ketua Tim Sensus Ekonomi	2	3	11
77	Kualitas data tidak sesuai harapan	Melakukan Monitoring kualitas	Perbandingan perubahan series antar periode dan antar Kecamatan untuk setiap indikator	Setiap bulan	Ketua Tim Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata	2	3	11
78	Petugas pendataan kurang memahami konsep	Melakukan briefing petugas sebelum dimulai pelaksanaan pendataan lapangan	Petugas survei jasa pariwisata yang telah dibriefing	Desember 2025	Ketua Tim Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata	2	3	11
79	Pelatihan jarang sekali dilakukan, sangat dimungkinkan ada petugas baik lama maupun baru belum mendapatkan pelatihan	Melakukan briefing dan membuat WAG untuk Koordinasi dan komunikasi mengenai konsep definisi dan permasalahan di lapangan	Realisasi 100%	Sebelum Jadwal Pencacahan	Ketua Tim	2	3	11
80	Petugas lupa terhadap konsep definisi dari isian kuesioner	1. Petugas membaca dulu buku pedoman kegiatan survei tersebut sebelum pelaksanaan lapangan. 2. Organik mendampingi petugas sewaktu pelaksanaan lapangan	Realisasi 100%	Desember 2025	Ketua Tim	2	3	11
81	Pelatihan jarang sekali dilakukan, sangat dimungkinkan ada petugas baik lama maupun baru belum mendapatkan pelatihan	Melakukan briefing dan membuat WAG untuk Koordinasi dan komunikasi mengenai konsep definisi dan permasalahan di lapangan	Realisasi 100%	Setiap triwulan	Ketua Tim	2	3	7
82	Responden tidak bisa diwawancara langsung karena isian kuesioner harus antar bagian/ bidang dan petugas tidak bisa menemui semua bidang terkait	1. Petugas menghubungi kontak person perusahaan tersebut 2. Petugas menjelaskan maksud dan tujuan survei 3. Kuesioner ditinggal dengan perjanjian kapan kuesioner bisa selesai.	Realisasi 100%	Setiap Bulan dan Triwulanan	Ketua Tim	2	2	7

83	Isian dokumen tidak lengkap dan atau non respon	1. Petugas menghubungi kontak person perusahaan tersebut 2. Petugas menjelaskan maksud dan tujuan survei 3. Petugas bersama pengawas memberikan pendekatan persuasif dan menjelaskan pentingnya data yang di kumpulkan. pendekatan persuasif dan	Realisasi 100%	Tahunan	Ketua Tim	2	2	7

		menjelaskan pentingnya data yang di kumpulkan.						
84	Responden tidak mengisi kuesioner secara lengkap dan konsistensi tidak terjaga	Mengkonfirmasi ulang ke responden.	Realisasi 100%	Bulanan dan Setiap triwulan	Ketua Tim	2	2	7
85	Petugas pengisi data perusahaan tidak paham dengan konsep dan definisi Kuesioner	1. Petugas menghubungi kontak person perusahaan tersebut 2. Petugas menjelaskan maksud dan tujuan survei 3. Petugas menjejelaskan cara pengisian dokumen .	Realisasi 100%	Bulanan dan Setiap triwulan	Ketua Tim	2	2	8
86	Responden tidak memiliki data sesuai dengan format kuesioner	1. Di BlOK Catatan ada keterangan yang menjelaskan pengertian data dari perusahaan 2. Membuat kuesioner yang sesuai dengan format data perusahaan	Realisasi 100%	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim	1	4	11
87	Responden memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pengisian kuesioner	Menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan dan sering menanyakan penyelesaian pengisian kuesioner .	Realisasi 100%	Akhir Jadwal Pengolahan	Ketua Tim	2	3	10
88	Perusahaan kurang jujur memberikan informasi	Menjelaskan maksud dan tujuan serta pendataan ini hanya untuk menghitung Indikator sebagai dasar evaluasi kebijakan pemangku terkait. .	Realisasi 100%	Sesuai ARC	Ketua Tim	3	2	8
89	Sulitnya bertemu dengan responden	PCS dan PMS diberi bekal pengetahuan tentang karakteristik perusahaan yang akan disurvei sehingga dapat mengorek data perusahaan dengan lebih baik .	Realisasi 100%	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim	1	4	10
90	Ada kemungkinan blok sensus yang potensial tidak tercover karena saat updating belum tanam	Mencari informasi kontak person dari sumber lain	Realisasi 100%	Akhir Jadwal Pengolahan	Ketua Tim	3	2	10
91	Terlewatnya pelaksanaan ubinan	Melaporkan ke BPS Provinsi	Realisasi 100%	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim	2	2	8
92	Updating perusahaan hortikultura tidak berjalan baik	Berusaha meminta kontak person ke responden ubinan	Realisasi 100%	Sesuai ARC	Ketua Tim	1	4	8
93	Kuesioner hilang di responden	Mencari sumber lain ke dinas peternakan kota Bekasi	Realisasi 100%	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim	1	4	10
94	Responden tidak memiliki data sesuai dengan format kuesioner	Berkunjung ulang ke responden.	Realisasi 100%	Akhir Jadwal Pengolahan	Ketua Tim	3	2	11
95	Updating perusahaan peternakan tidak berjalan baik	Mencari petugas lapangan yang kegiatan nya tidak terlalu banyak sehingga pelaksanaan di lapangan bisa berjalan dengan baik.	Realisasi 100%	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim	2	3	10

96	Peta BS yang digunakan adalah peta SE 2016, yang waktu nya sudah cukup lama, sehingga muatannya sudah tidak *update* dengan kondisi	Tetap mengikuti Peta BS dari SE 2016 dan menyesuaikan dengan batas2 di dalam peta.	Realisasi 100%	Sebelum pencacahan	Ketua Tim	3	2	11

	sekarang.							
97	Penulisan kegiatan usaha yang kurang jelas	Pada saat briefing di perjelas jenis usaha dari kegiatan utama ditanyakan membuat apa, produknya apa dan bahan baku utamanya apa.	Realisasi 100%	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim	2	3	10
98	Sulitnya mencari keberadaan perusahaan	Petugas datang sesuai alamat yang tertera dan menanyakan ke pengurus SLS stempat atau tokoh masyarakat setempat terkait keberadaaan perusahaan	Realisasi 100%	Akhir Jadwal Pengolahan	Ketua Tim	3	2	11
99	Banyak perusahaan hasil matching tidak ditemukan di alamat yang tertera di daftar sampel yang didapatkan di asosiasi dan unit pelayanan terpadu daerah serta	Mengidentifikasi perusahaaan lewat pengutipan data perusahaan kepada instansi terkait (Disnaker, DPMPTSP, Disdagperin) dan Update perusahaan.	Realisasi 100%	Akhir bulan	Ketua Tim	2	3	11
100	Sulit mencari responden sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk survei konstruksi tahunan dan triwulanan.	Dilakukan penggantian sampel dengan mengacu kepada ketentuan sampel eligible.	Realisasi 100%	Akhir Tahun Anggaran	Ketua Tim	2	3	11
101	Petugas kurang memahami tujuan dari kegiatan survei konstruksi.	Mengidentifikasi awal perusahaan konstruksi yang respon	Realisasi 100%	Akhir Tahun Anggaran	Ketua Tim	2	3	11
102	Perusahaan yang terkait tidak paham dengan cara/isian kuesioner	Diadakan Briefing UDP Konstruksi dan Pencacahan SKTH dan SKTR sebelum turun ke lapangan	Realisasi 100%	Akhir Tahun Anggaran	Ketua Tim	2	3	11
103	Sebagian responden ada yang menolak untuk diwawancarai	Memberikan kunjungan pengawasan kepada responden	Realisasi 100%	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim	2	3	11
104	Responden terindikasi menjawab sekenanya	Memberikan kunjungan pengawasan kepada responden	Realisasi 100%	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim	2	3	11
105	Untuk pencacahan UPB UTL yang menggunakan moda CAPI, seringkali jawaban dari responden tidak konsisten.	Dilaksanakan pemeriksaan Dokumen yang lebih teliti serta konfirmasi ke petugas dan responden	Realisasi 100%	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim	2	3	11
106	Untuk pencacahan UPB UTL kadang-kadang responden meminta diberikan dokumen/ kuesioner hard copy untuk diisi sendiri.	Petugas pencacah berkonsultasi kepada pengawasnya agar data menjadi clean dan bisa submit	Realisasi 100%	Akhir Jadwal Pencacahan	Ketua Tim	2	3	11
107	ada kemungkinan sub segmen KSA tidak bisa dijangkau	Melakukan briefing dan membuat WAG untuk Koordinasi dan komunikasi mengenai konsep definisi dan permasalahan di lapangan	Realisasi 100%	Setiap Bulan	Ketua Tim	2	3	11
108	Publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha Triwulanan yang terbit tidak tepat waktu	1. Melakukan koordnasi terkait PIC pada setiap stakeholder 2. Menyusun timeline kerja	1. Daftar PIC pada setiap stakeholder 2. Jadwal Timeline Kerja	Periodik	tim neraca produksi	2	2	7

109	Data dasar dari lapangan usaha tidak lengkap atau terlambat masuk	1. Merumuskan jadwal dan matriks kerja penyusunan Publikasi PDRB Lapangan Usaha 2. Pendampingan teknis Kinerja	1. Jadwal ARC Publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha 2. Pendampingan Permintaan Data	Periodik	tim neraca produksi	1	3	5
110	Data dasar dari lapangan usaha tidak lengkap atau terlambat masuk	1. Membuat jadwal dan matriks kerja pendataan SKNP 2. Melakukan monitoring kegiatan 3. Pengawasan/Pendampingan	1. Surat tugas pelaksanaan SKNP 2. Laporan Monitoring 3. Dokumentasi Pengawasan/pendampingan	Setiap Tahun	tim neraca produksi	1	2	3
111	Respon Rate SKTNP barang tidak sesuai target	1. Membuat jadwal dan matriks kerja pendataan SKTNP barang 2. Melakukan monitoring kegiatan 3. Pengawasan/Pendampingan	1. Surat tugas pelaksanaan SKTNP barang 2. Laporan Monitoring 3. Dokumentasi Pengawasan/pendampingan	Setiap Triwulan	tim neraca produksi	2	2	7
112	Respon Rate SKTNP Jasa tidak sesuai target	1. Membuat jadwal dan matriks kerja pendataan SKTNP jasa 2. Melakukan monitoring kegiatan 3. Pengawasan/Pendampingan	1. Surat tugas pelaksanaan SKTNP Jasa 2. Laporan Monitoring 3. Dokumentasi Pengawasan/pendampingan	Setiap Triwulan	tim neraca produksi	2	2	7
113	Pemasukan data PDAM tidak sesuai target	Membuat jadwal kegiatan	Surat tugas Pelaksanaan Survei PDAM	Setiap Triwulan	tim neraca produksi	2	2	7
114	1. Keterlambatan pencairan honor. 2. Kesalahan perhitungan honor	1. Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan 2. Mengoreksi pembayaran yang salah (kurang/lebih), 1.	SPJ yang sudah direvisi/diperbaiki	Setiap Triwulan	tim neraca produksi	2	2	7
115	Publikasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yang dihasilkan yang bersumber dan aktivitas Statistik yang menerapkan Standard Akurasi tidak terbit tepat waktu	1. Membuat matrik kerja penyusunan publikasi 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kinerja yang sudah ditetapkan 3. Supervisi/Pengawasan/Pendampingan Kinerja	1. Matrik kerja penyusunan publikasi 2. Laporan monev kinerja 3. Laporan supervisi/pengawasan/pendampingan Kinerja	Tahunan	Tim Neraca Pengeluaran dan Analisis Statistik	1	2	3
116	BRS IPM BPS Kota Bekasi tidak terbit tepat waktu	Mengkonfirmasi ulang ke responden. 1. Monitoring dan evaluasi penyelesaian kegiatan 2. Pendampingan penyelesaian penyusunan berita resmi statistik 3. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan SM Provinsi	1. Laporan monitoring dan evaluasi penyelesaian kegiatan 2. Laporan pendampingan penyelesaian penyusunan berita resmi statistik 2. Adanya koordinasi dengan SM Provinsi	Tahunan	Tim Neraca Pengeluaran dan Analisis Statistik	2	2	7
117	Upload BRS IMP BPS Kota Bekasitidak tepat waktu	1. Monitoring dan evaluasi penyelesaian kegiatan 2. Pendampingan penyelesaian penyusunan berita resmi statistik 3. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan SM Provinsi 1.	1. Laporan monitoring dan evaluasi penyelesaian kegiatan 2. Laporan pendampingan penyelesaian penyusunan berita resmi statistik 2. Adanya koordinasi dengan SM Provinsi	Tahunan	Tim Neraca Pengeluaran dan Analisis Statistik	2	2	7

118	Publikasi PDRB Menurut Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan tidak terbit tepat waktu	1. Merumuskan jadwal dan matriks kerja penyusunan PDRB Pengeluaran Triwulanan maupun Tahunan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kinerja yang sudah ditetapkan 3. Melakukan koordinasi yang aktif dengan Dinas/Instansi terkait 4. Melakukan koordinasi dengan SM terkait data pendukung PDRB dan fenomena yang terjadi di lapangan	1. Jadwal dan matriks kerja PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan 2. Laporan monitoring dan evaluasi rencana kerja yang telah ditetapkan 3. Koordinasi yang aktif dengan dinas/instansi terkait 4. Koordisai yang aktif dengan SM terkait data pendukung PDRB dan fenomena ekonomi	Tahunan	Tim Neraca Pengeluaran dan Analisis Statistik	2	2	7

119	Respon rate SKLNPT tidak mencapai target	1. Membuat jadwal dan matriks kerja pendataan SKLNPT 2. Melakukan monitoring kegiatan 3. Pengawasan/Pendampingan	1. Surat tugas pelaksanaan SKLNPT 2. Laporan Monitoring 3. Dokumentasi Pengawasan/pendampingan	Triwulanan	Tim Neraca Pengeluaran dan Analisis Statistik	1	2	3
120	Respon rate SKPS tidak mencapai target	1. Membuat jadwal dan matriks kerja pendataan SKPS 2. Melakukan monitoring kegiatan 3. Pengawasan/Pendampingan	1. Surat tugas pelaksanaan SKPS 2. Laporan Monitoring 3. Dokumentasi Pengawasan/pendampingan	Triwulanan	Tim Neraca Pengeluaran dan Analisis Statistik	1	2	3
121	Respon rate SKSPPI tidak mencapai target	1. Membuat jadwal dan matriks kerja pendataan SKSPPI 2. Melakukan monitoring kegiatan 3. Pengawasan/Pendampingan	1. Surat tugas pelaksanaan SKSPPI 2. Laporan Monitoring 3. Dokumentasi Pengawasan/pendampingan	Triwulanan	Tim Neraca Pengeluaran dan Analisis Statistik	1	2	3
122	Respon rate SKSIP tidak mencapai target	1. Membuat jadwal dan matriks kerja pendataan SKSIP 2. Melakukan monitoring kegiatan 3. Pengawasan/Pendampingan.	1. Surat tugas pelaksanaan SKSIP 2. Laporan Monitoring 3. Dokumentasi Pengawasan/pendampingan	Triwulanan	Tim Neraca Pengeluaran dan Analisis Statistik	1	2	3
123	Respon rate PMTB tidak mencapai target	1. Membuat jadwal dan matriks kerja pendataan PMTB 2. Melakukan monitoring kegiatan 3. Pengawasan/Pendampingan	1. Surat tugas pelaksanaan PMTB 2. Laporan Monitoring 3. Dokumentasi Pengawasan/pendampingan	Triwulanan	Tim Neraca Pengeluaran dan Analisis Statistik	1	2	3
124	Respon rate Updating Direktori tidak mencapai target	1. Membuat jadwal dan matriks kerja pendataan Updating Direktori 2. Melakukan monitoring kegiatan 3. Pengawasan/Pendampingan	1. Surat tugas pelaksanaan Updating Direktori 2. Laporan Monitoring 3. Dokumentasi Pengawasan/pendampingan	Triwulanan	Tim Neraca Pengeluaran dan Analisis Statistik	1	2	3
125	Data PDRB Pengeluaran yang dihasilkan tidak berkualiitas	1. Pengumpulan fenomena ekonomi dilakukan oleh seluruh pegawai 2. Menysun jadwal dan matriks kerja terkait pengeumpulan fenomena ekonomi	1. Folder fenomena ekonomi dari seluruh pegawai 2. Jadwal dan matriks kerja	Triwulanan	Tim Neraca Pengeluaran dan Analisis Statistik	1	2	3
126	1. Keterlambatan pencairan honor. 2. Kesalahan perhitungan honor	1. Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan 2. Mengoreksi pembayaran yang salah (kurang/lebih),	SPJ yang sidah direvisi/diperbaiki	Setiap Triwulan	tim neraca produksi	2	2	7
127	Pemeriksaan pengajuan perubahan wilayah administrasi, masters BS dan SLS terlambat dilakukan	1. Monitoring secara berkala 2. Membentuk media komunikasi dengan PJ kegiatan seperti grup WA	Jumlah Laporan	Selama kegiatan pemutakhiran data	Ketua Tim Metodologi dan Pengolahan	3	2	10
128	Penyusunan publikasi tidak dapat diselesaikan tepat waktu	1. Menyusun publikasi/laporan sesuai dengan tanggal pelaporan kegiatan 2. Membuat timeline penyusunan publikasi/BRS	Timeline Penyusuan publikasi dan Penanggung jawabnya	Selama kegiatan pemutakhiran data	Ketua Tim Metodologi dan Pengolahan	1	1	1
129	Progress monitoring tidak uptodate	1. Menyediakan sistem pelaporan otomatis dari PPL, PML, Kabkota	Laporan progres kegiatan	Selama kegiatan pemutakhiran data	Ketua Tim Metodologi dan Pengolahan	2	2	7
130	Pengawasan ke Kecamatan tidak Maksimal	Dilakukan penggantian sampel dengan mengacu kepada ketentuan sampel eligib 1. Membuat strategi pengawasan online 2. Memaksimalkan fungsi PML le.	Laporan progres kegiatan	Selama kegiatan pemutakhiran data	Ketua Tim Metodologi dan Pengolahan	2	2	7

131	Terdapat anomali data hasil pendataan muatan wilkerstat	1. Pengawasan kualitas data dilakukan sejak awal pemdataan 2. Membuat rule anomali sejak awal pengolahan	Laporan kualitas data	Selama kegiatan pemutakhiran data	Ketua Tim Metodologi dan Pengolahan	1	1	1
132	Adanya gap/overlap peta spasial yang dihasilkan	1. Pengawasan kualitas data dilakukan sejak awal pemdataan 2. Membuat rule anomali sejak awal pengolahan .	Laporan kualitas data	Selama kegiatan pemutakhiran data	Ketua Tim Metodologi dan Pengolahan	1	1	1
133	Peta Digital tidak dapat diupload	1. Mengirimkan data ke BPS RI tidak melalui aplikasi	Laporan kegiatan	Setelah pengolahan selesai	Ketua Tim Metodologi dan Pengolahan	1	1	1
134	Keterbatasan jaringan internet di kantor	- Melaporkan segera jika jaringan internet/LAN terputus - Melakukan pengecekan koneksi internet, kapasitas penyimpanan, dan kecepatan transfer data. - Dukungan internet cukup kapasitas pengguna	Jaringan internet berjalan dengan baik	Setiap bulan	Ketua Tim Infrastruktur Data Statistik	2	3	11
135	Keterbatasan jaringan internet di kantor	- Melakukan pengecekan koneksi internet, kapasitas penyimpanan, dan kecepatan transfer data. - Melaporkan segera jika jaringan internet/LAN terputus - Memastikan jaringan internet dan kabel LAN siap digunakan - Dukungan internet cukup kapasitas pengguna	Jaringan internet dapat berjalan stabil	Setiap bulan	Ketua Tim Infrastruktur Data Statistik	2	3	11
136	SKD tidak rilis tepat waktu	Melakukan evaluasi capaian secara rutin	Laporan	Selama kegiatan berjalan	Ketua Tim Diseminasi dan Layanan Statistik	1	2	3
137	Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Surat Rekomendasi harus menyerahkan hasil kegiatannya dalam bentuk softcopy sesuai UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	Pencatatan Ketersediaan Kapasitas Ruang Media Penyimpanan (pemeriksaaan dilakukan setiap seminggu sekali)	Laporan	Selama kegiatan berjalan	Ketua Tim Diseminasi dan Layanan Statistik	2	2	7
138	Pelayanan Konsultasi kepada Kelompok (Organisasi/Instansi/Perusahaan) dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan Aplikasi Ruang Meeting Virtual	Penyediaan Nomor Whatsapp Layanan, Pencatatan Daftar Permintaan Konsultasi Online, Link Zoom dan Pemantauan Viewer dan Komentar di media sosial untuk Video Sosialisasi yang telah di upload 1.	Laporan	Selama kegiatan berjalan	Ketua Tim Diseminasi dan Layanan Statistik	2	2	7
139	Pengguna Layanan menyampaikan permintaan pelayanan diluar jam pelayanan	Pencatatan pemintaan pelayanan yang masuk dari whatsapp dilengkapi waktu permintaan	Laporan	Selama kegiatan berjalan	Ketua Tim Diseminasi dan Layanan Statistik dan Ketua Tim Humas	2	2	7
140	Pengguna Layanan menganggap semua data tersedia di BPS	Pemantauan upload konten sosialisasi di media sosial dan Pemantauan Viewer dan Komentar di media sosial untuk Video Sosialisasi yang telah di upload	Laporan	Selama kegiatan berjalan	Ketua Tim Diseminasi, Layanan Statistik dan Ketua Tim Humas dan Tim Pojok Statistik	4	3	16

141	Status Permintaan Layanan Rekomendasi Statistik tidak dapat berubah menjadi selesai karena tidak ada tindak lanjut dari pengguna layanan sampai batas waktu yang telah ditetapkan	Pemantauan transaksi baru dan transaksi yang belum terselesaiakn secara harian dan Evaluasi proses penyelesaian transaksi pelayanan untuk perbaikan waktu pelayanan yang melebihi standar	Laporan	Selama kegiatan berjalan	Ketua Tim Pembinaan Statistik Sektoral	4	2	12

142	Transfer pengetahuan dari Jawara Data yang lama kepada Jawara Data yang baru tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik bahkan ditengarai kerap tidak terjadi. Ini dapat berakibat pada bertambahnya waktu untuk penyusunan usulan rekomendasi kegiatan statistik perangkat daerah karena minimnya pengetahuan Jawara Data yang baru tersebut terkait penyusunan rekomendasi statistik.	Monitoring target dan realisasi pelaksanaan pembinaan statistik dan Monitoring penyelesaian usulan rekomendasi kegiatan statistik	Laporan	Selama kegiatan berjalan	Ketua Tim Pembinaan Statistik Sektoral	2	2	7
143	Tidak tersedia penjelasan untuk setiap nilai yang digunakan pada skala nilai di SKD sehingga penilaian dapat menjadi bias atau miss interpretasi dan Nama survei yang dipakai untuk penilaian kepuasan adalah Survei Kebutuhan Data sehingga menimbulkan kesalahpahaman dari Pengguna Layanan	Melakukan sosialisasi kegiatan Survei Kebutuhan Data melalui website	Laporan	Selama kegiatan berjalan	Ketua Tim Diseminasi dan Layanan Statistik, Ketua Tim Pembinaan Statistik Sektoral dan Ketua Tim Humas	4	4	19
144	Pengguna Layanan Online tidak mendapatkan notifikasi untuk memberikan penilaian terhadap layanan yang telah diberikan	Monitoring pengisian SKD menurut responden	Laporan	Selama kegiatan berjalan	Ketua Tim Diseminasi dan Layanan Statistik	3	2	10
145	Pengguna Layanan mengajukan Permintaan Produk Statistik melalui email/whatsapp untuk Produk Statistik yang telah tersedia pada situs resmi secara publik	Pemantauan upload konten sosialisasi di media sosial dan Pemantauan Viewer dan Komentar di media sosial untuk Video Sosialisasi yang telah di upload	Laporan	Selama kegiatan berjalan	Ketua Tim Diseminasi dan Layanan Statistik dan Ketua Tim Humas	4	3	16
146	Publikasi dapat diakses secara online	Pemantauan progress upload hasil alih media publikasi tercetak dan Pemantauan upload konten sosialisasi di media sosial	Laporan	Selama kegiatan berjalan	Ketua Tim Diseminasi dan Layanan Statistik dan Ketua Tim Humas	4	3	16

D. Pemantauan

Pemantauan risiko yang dilakukan di BPS Kota Bekasi dilakukan secara berkelanjutan dan berkala. Pemantauan dilakukan secara semesteran dan tahunan. Pemantauan dilakukan dalam konteks organisasi, prioritas risiko, dan sistem pengendalian intern. Penilaian ulang terhadap profil risiko dapat dilakukan jika terdapat perubahan yang signifikan.

BAB IV PENUTUP

Profil risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di BPS Kota Bekasi yang dilakukan berdasarkan perjanjian kinerja Kepala BPS Kota Bekasi. Penyesuaian laporan akan dilakukan jika terjadi perubahan Perjanjian Kinerja atau Rencana Strategis di lingkungan BPS Kota Bekasi

LAMPIRAN

Tabel 1 Identifikasi Risiko

Unit Organisasi : BPS Kota

Bekasi Periode Penerapan :

Semester II 2025

No	Bisnis Proses			Pernyataan Risiko		Penyebab Risiko		Dampak	Kategori Risiko	Sumber Risiko		Risiko Aktual			Pengendalian yang Telah Dilaksanakan				Kategori Risiko
	Tahapan Kegiatan	No	Uraian Kegiatan	No	Uraian	No	Uraian			Internal	Eksternal	Peluang	Dampak	Risiko	Uraian	E	KE	TE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko	1	10 - DOKUMEN RKA-KL	1	Ketidakselarasan antara anggaran dan kegiatan	1	Perubahan Rancangan kegiatan (terkait proses bisnis, asumsi dasar, jadwal, alokasi anggaran, dan target output) yang sangat dinamis	Pencapaian target output kinerja dan anggaran dari rangkaian kegiatan tidak tercapai secara optimal	Risiko Operasional	V	V	4	3	16	Melakukan koordinasi dan revisi anggaran	v			
2	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko	2	10 - DOKUMEN RKA-KL	2	Anggaran di POK tidak mencukupi	2	Efisiensi anggaran	Pencapaian target output kinerja dan anggaran dari rangkaian kegiatan tidak tercapai secara optimal.	Risiko Kebijakan		V	3	3	14	Memperbaiki Penghitungan Kebutuhan Anggaran dengan memprioritaskan pembayaran honor mitra dan anggaran lain yang terkait dengan pihak eksternal	v			
3	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	3	85 - PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	3	Kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan	3	Terlambatnya PJ beradaptasi tehadap perubahan berbagai aturan terkait pengelolaan keuangan	Pengelolaan keuangan berpotensi dinilai tidak akuntabel	Risiko Kepatuhan	V		2	5	21	Meningkatkan pemahaman pegawai, terutama PJ Kegiatan dan pengelola anggaran terhadap perubahan peraturan dan kelengkapan berkas administrasi	v			
4	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	4	15 - GAJI DAN TUNJANGAN	4	Gangguan pada aplikasi dan atau prosedur setiap tahapan tidak dipatuhi sesuai yang telah ditetapkan	4	Gangguan pada aplikasi dan atau prosedur setiap tahapan tidak dipatuhi sesuai yang telah ditetapkan	Pegawai tidak menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Risiko Operasional	V		2	3	11	Mengawal setiap tahapan berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan	v			

5	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	5	15 - GAJI DAN TUNJANGAN	5	Gaji dan tunjangan tidak diterima sesuai hak pegawai	5	Kurangnya koordinasi antara tim kepegawaian dan pengelola gaji dan tunjangan tentang perubahan data kepegawaian	Pegawai tidak menerima gaji dan tunjangan sesuai haknya	Risiko Operasional	V		3	4	17	Membangun koordinasi yang efektif dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan	v			
6	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	6	7 - DOKUMEN PERBENDAHARAAN : EVALUASI	6	Pada LHP APIP dan BPK terdapat temuan kesalahan administrasi	6	Kelengkapan dan kualitas administrasi belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan	Pengelolaan keuangan tidak akuntabel	Risiko Kepatuhan	V		3	4	17	Meningkatkan pemahaman pengelolaan administrasi bagi pegawai dan pengelola keuangan	v			
7	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	7	8 - DOKUMEN PERBENDAHARAAN : PELAKSANAAN	7	Dokumen perbendaharaan tidak terarsipkan dengan baik	7	Belum adanya arsiparis di tim keuangan	Dokumen perbendaharaan tidak dapat diakses dengan cepat dan mudah	Risiko Operasional	V		4	4	19	Mengelola arsip dengan menggunakan aplikasi dan SDM yang ada		v		
8	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	8	32 - LAPORAN KEUANGAN	8	Kekurangan dokumen sumber, kesalahan perjurnalan dan penjelasan kurang memadai	8	Pemahaman penyusun LK, Ketelitian Penyusun LK	Kualitas Laporan Keuangan kurang relevan	Risiko Operasional	V		3	4	17	Meningkatkan pemahaman dan kompetensi penyusun LK	v			
9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak	9	62 - LAYANAN REFORMASI BIROKRASI	9	Pegawai tidak memiliki komitmen yang sama untuk membangun zona integritas	9	Pemahaman dan kesadaran tentang pembangunan zona integritas masih rendah	Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM tidak berhasil	Risiko Reputasi	V		3	4	17	Melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas	v			
10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak	10	62 - LAYANAN REFORMASI BIROKRASI	10	Pemenuhan bukti dukung tidak sesuai yang diminta oleh Tim Penilai	10	Bukti dukung yang diminta setiap tahun berbeda dan diberikan dalam waktu yang mendesak	Evaluasi LKE Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM tidak berhasil	Risiko Reputasi	V		3	4	17	Melakukan sosialisasi tentang filosofi pembangunan zona integritas	v			

11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak	11	62 - LAYANAN REFORMASI BIROKRASI	11	Pimpinan dan atau anggota tidak memahami pembangunan zona integritas yang berjalan	11	Pimpinan dan atau anggota baru mutasi masuk ke unit kerja	Evaluasi Wawancara dan Verifikasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM tidak berhasil	Risiko Reputasi	V		3	4	17	Melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas	v			
12	Terwujudnya Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan, dan Inovasi	12	47 - LAYANAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	12	Tidak bisa mengajukan ujian kompetensi	12	Tidak lulus ujian kompetensi	Kenaikan jenjang jabatan terhambat	Risiko Reputasi	V		1	2	3	Pembinaan/Bimbingan Teknis kinerja	v			
13	Terwujudnya Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan, dan Inovasi	13	36 - LAYANAN ADMINSTRASI PEGAWAI	13	Data kepegawaian tidak up to date	13	Tidak melaporkan perubahan data kepegawaian	Data kepegawaian kurang akurat	Risiko Operasional	V		2	2	7	Surat edaran		v		
14	Terwujudnya Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan, dan Inovasi	14	46 - LAYANAN MUTASI PEGAWAI	14	Terjadi mutasi pada pegawai BPS	14	Pegawai yang bertugas menjadi inda di mutasi ke satker lain	Pegawai tertentu kelebihan beban kerja	Risiko Operasional	V		2	1	2	Optimalisasi SDM dengan beban kerja yang merata	v			
15	Terwujudnya Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan, dan Inovasi	15	80 - PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	15	Penyimpanan/pengarsipan dokumen tidak dilaksanakan dengan baik	15	Penataan alur dokumen tidak terencana dengan baik	Dokumen hilang	Risiko Operasional	V		3	2	10	Pembagian tugas yang lebih detil	v			
16	Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisiensi Pengelolaan BMN	16	58 - LAYANAN PENGELOLAAN BMN	16	Risiko kehilangan atau kerusakan BMN	16	Tingkat pemahaman pengguna yang berbeda-beda	Pelaksanaan kegiatan tidak efektif	Risiko Operasional	V		3	1	4	Melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas	v			
17	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	17	105 - PENGIRIMAN DAN PENCETAKAN DOKUMEN	17	Alokasi anggaran tidak efisien	17	belum jadinya bahan untuk dicetak	Harga akan tinggi karena jumlah waktu yang diperlukan sangat sempit untuk mencetak	Risiko Fraud	V		1	3	5	Melakukan Pembandingan harga dan untuk pengiriman memakai vendor yang sudah publish harganya	v			
18	Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisiensi Pengelolaan BMN	18	152 - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 DAN RODA 2	18	Risiko kerusakan kendaraan akibat perawatan yang tidak tepat	18	Jadwal perawatan yang tidak teratur dan keterbatasan anggaran	Terhambatnya perawatan kendaraan dan biaya yang mungkin akan lebih besar	Risiko Operasional	V		2	2	7	Melakukan reschedule jadwal perawatan kendaraan -	v			
															teratur - Penggunaan suku cadang yang asli dan berkualitas				

19	Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima	19	39 - LAYANAN HUMAS	19	Tidak tersedianya penyimpanan file dokumentasi kegiatan organisasi	19	Keterbatasan alokasi anggaran untuk Layanan Kehumasan, termasuk pengadaan layanan penyimpanan file	Setiap pegawai/tim tidak bisa mengakses kebutuhan dokumentasi secara efektif	Risiko Operasional	V		4	4	19	Menggunakan dana pribadi untuk berlangganan aplikasi penyimpanan file		v		
20	Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima	20	39 - LAYANAN HUMAS	20	Terbatasnya aplikasi untuk membuat konten di media sosial	20	Keterbatasan alokasi anggaran untuk Layanan Kehumasan, termasuk pengadaan aplikasi pembuatan konten	Konten kurang optimal, baik secara tampilan maupun isi	Risiko Operasional	V		4	4	19	Menggunakan aplikasi berbiaya nol rupiah dengan tools yang terbatas		v		
21	Terwujudnya Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan, dan Inovasi	21	36 - LAYANAN ADMINSTRASI PEGAWAI	21	\ Penyalahgunaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan	21	Pengelola kepegawaian tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku	Merugikan hak-hak pegawai yang harusnya didapatkan	Risiko Kepatuhan	V		3	4	17	Penguatan prosedur, pengawasan atasan, dan penyusunan sistem terintegrasi	v			
22	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	22	32 - LAPORAN KEUANGAN	22	Pegawai yang melakukan perjalanan dinas tidak sesuai dengan hari yang tertera pada surat tugas	22	Pegawai memiliki kepentingan pribadi, sehingga memanfaatkan hari perjalanan dinas untuk melakukan kegiatan diluar kedinasan	Kegiatan pengawasan tidak optimal	Risiko Fraud	V		4	3	16	Membuat laporan perjalanan dinas dan dokumentasi foto setiap hari menggunakan open camera	v			
23	Terwujudnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Desa untuk Menghasilkan Statistik Berkualitas	23	4 - DESA CANTIK	23	Pembinaan agen statistik tidak dapat dilaksanakan	23	Ada kegiatan atau jadwal lain yang dilakukan agen statistik	Terhambatnya pemberian materi pembinaan kepada agen statsitik	Risiko Operasional		V	3	2	10	Membuat jadwal kegiatan pembinaan bersama agen statistik	v			
24	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	24	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	24	Calon Petugas kurang memahami konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	24	Pelatihan online dan waktu pelatihan singkat	Penurunan kualitas data	Risiko Kebijakan	V		3	4	17	1. Mengadakan pelatihan dengan MOOC yang terdokumentasikan. 2.Menyiapkan forum diskusi melalui WAG 3.Pendampingan dan Pengawasan dilakukan secara intensif terutama pada petugas baru -	v			

25	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	25	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	25	Penolakan dari responden	25	Maksud dan tujuan pendataan BPS kurang dipahami masyarakat, masyarakat cenderung defensif terhadap pertanyaan tentang data pribadi	Respon rate turun	Risiko Operasional		V	4	3		PML melakukan pendampingan pencacahan	v			
26	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	26	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	26	Petugas melakukan moral hazard dalam pengumpulan data, seperti mengisi data fiktif, tidak mengunjungi responden, atau manipulasi jawaban, dll-	26	1. P engawasan yang kurang maksimal. 2. Wakt u penyelesaian pekerjaan singkat.	Data tidak akurat	Risiko Fraud		V	3	3		Melakukan uji petik kunjungan ke lokasi responden untuk mengecek kebenaran data	v			
29	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	29	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	29	Masih terdapat anomali data hasil pencacahan lapangan	29	Kurang optimalnya pemeriksaan	Penurunan kualitas data	Risiko Operasional	V		4	3	16	Monitoring dari BPS Provinsi melalui web monitoring	v			
30	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	30	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL AGUSTUS	30	Kurangnya kontrol kualitas data terkait kewajaran isian	30	Rule Validasi tidak dipasang secara ketat, masih ada beberapa kesalahan yang lolos	Penurunan kualitas data	Risiko Operasional	V		4	3		Penambahan rule validasi berupa query tools SQL LAB dashboard fasih	v			

32	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	32	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	32	Penyelesaian pendataan terlambat dari jadwal yang telah ditentukan	32	Responden sulit ditemui	Keterlambatan pelaksanaan Proses Bisnis selanjutnya	Risiko Operasional	V		4	3	16	1.Koordinasi dengan pengurus wilayah setempat untuk dibuatkan janji untuk wawancara dengan responden 2.Kunjungan berkali-kali ke responden 3.Menghubungi responden via telp/whatsApp untuk membuat janji kunjungan wawancara	v			
33	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	33	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	33	Server CAPI/Fasih maintanance	33	Server Pusat terkendala	Petugas tidak dapat membuka/mengirim aplikasi	Risiko Operasional	V		3	3	14	1. Melakukan pendataan tidak menggunakan sinyal 2. Melakukan submit berkala pada jam tidak sibuk	v			

36	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	36	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	36	Data Tidak Konsisten/kurang memenuhi tingkat kewajaran	36	Kurang optimalnya pemeriksaan	Indikator yang dihasilkan kurang sesuai	Risiko Operasional	V		3	3	14	Melakukan pengecekan kembali isian yang tidak konsisten, membandingkan dengan raw data periode sebelumnya	v			
37	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	37	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	37	Kualitas data tidak sesuai harapan	37	Pengecekan indikator sementara kurang optimal	Indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan tidak tepat	Risiko Operasional	V		3	3	14	Memperbaiki isian yang tidak konsisten, membandingkan dengan raw data periode sebelumnya	v			
38	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	38	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	38	Kesalahan pengisian data oleh petugas	38	Petugas salah mengisi jawaban dari responden di kuesioner/CAPI	Data yang dihasilkan tidak berkualitas	Risiko Reputasi	V		3	3	14	1. Mengingatkan petugas agar berhati² pada saat mengisi jawaban 2. Pengawas melakukan uji petik pilihan jawaban	v			
39	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	39	163 - SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL	39	Isian tidak lengkap, tidak wajar, tidak konsisten	39	Petugas kurang probing	Data tidak berkualitas	Risiko Operasional	V		4	4	19	pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas pemeriksa	v			
40	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	40	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	40	Calon Petugas kurang memahami konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	40	Pelatihan online dan waktu pelatihan singkat	Penurunan kualitas data	Risiko Kebijakan	V		3	4	17	1.Mengadakan pretest, posttest dan tugas mandiri 2.Menyiapkan forum diskusi melalui WAG 3.Pendampingan dan Pengawasan dilakukan secara intensif terutama pada petugas baru	v			
41	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	41	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	41	Penolakan dari responden	41	Maksud dan tujuan pendataan BPS kurang dipahami masyarakat	Respon rate turun	Risiko Operasional		V	4	3	16	PML melakukan pendampingan pencacahan dan PCL dibekali dengan leaflet	v			
42	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	42	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	42	Petugas melakukan pelanggaran SOP (Petugas melakukan moral	42	1. Pengawasan yang kurang maksimal. 2. W	Data tidak akurat	Risiko Fraud		V	3	3	14	Melakukan uji petik kunjungan ke lokasi responden untuk mengecek kebenaran data	v			

					hazard dalam		aktu penyelesaia h												

					pengumpulan data, seperti mengisi data fiktif, tidak mengunjungi responden, atau manipulasi jawaban)		pekerjaan singkat.												
43	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	43	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	43	Kualitas pengawasan yang tidak optimal	43	Banyaknya kegiatan dalam waktu yang bersamaan	1.Ditemukan kesalahan berulang di tingkat petugas pendataan 2.Pendataan tidak sesuai SOP	Risiko Operasional	V		4	3	16	Membuat alokasi beban tugas PML	v			
44	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	44	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	44	Responden tidak memahami maksud pertanyaan dalam kuesioner	44	Petugas membaca pertanyaan di kuesioner secara utuh tanpa memberikan penjelasan lebih	Jawaban responden tidak sesuai dengan maksud pertanyaan sehingga data tidak akurat	Risiko Operasional	V		4	3	16	1. Mengefektifkan Sesi Roleplaying untuk berlatih wawancara 2.Pendampingan oleh PML di awal pendataan	v			
45	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	45	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	45	Masih terdapat anomali data hasil pencacahan lapangan	45	Kurang optimalnya pemeriksaan	Penurunan kualitas data	Risiko Operasional	V		4	3	16	Monitoring dari BPS Provinsi melalui web monitoring	v			
46	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	46	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	46	Kurangnya kontrol kualitas data terkait kewajaran isian	46	Rule Validasi tidak dipasang secara ketat, masih ada rulval yang lolos	Penurunan kualitas data	Risiko Operasional	V		4	3	16	Penambahan rule validasi berupa query tools	v			
47	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	47	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	47	Penolakan Ketua SLS	47	1. Lurah tidak meneruskan informasi mengenai Kegiatan Statistik ke Ketua SLS 2.Kurangnya pemahaman ketua SLS terhadap kegiatan Statistik	Penolakan survey di tingkat SLS	Risiko Operasional		V	4	3	16	1. Petugas membawa Surat Pemberitahuan dari BPS untuk Kelurahan dan Ketua SLS terkait kegiatan pendataan. 2. Petugas meminta pihak kelurahan menginformasikan melalui kegiatan survei kepada ketua SLS	v			

48	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	48	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	48	Penyelesaian pendataan terlambat dari jadwal yang telah ditentukan	48	Responden sulit ditemui	Keterlambatan pelaksanaan Proses Bisnis selanjutnya	Risiko Operasional	V		4	3	16	1.Koordinasi dengan pengurus wilayah setempat untuk dibuatkan janji untuk wawancara dengan responden 2.Kunjungan berkali-kali ke responden 3.Menghubungi responden via telp/whatsApp untuk membuat janji kunjungan wawancara	v			
49	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	49	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	49	Publikasi tidak selesai tepat waktu	49	Format penyajian dari pusat berkali-kali mengalami perubahan Waktu penyelesaian singkat	Keterlambatan Terbit Publikasi	Risiko Operasional	V		3	3	14	Menambah anggota tim penyusun Publikasi	v			
50	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	50	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	50	Kualitas data tidak sesuai harapan	50	Pengecekan indikator sementara kurang optimal	Indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan tidak tepat	Risiko Operasional	V		3	3	14	Memperbaiki isian yang tidak konsisten	v			
51	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	51	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	51	Kesalahan pengisian data oleh petugas	51	Petugas salah mengisi jawaban dari responden di kuesioner/CAPI	Data yang dihasilkan tidak berkualitas	Risiko Reputasi	V		2	3	14	1. Mengingatkan petugas agar benar pada saat mengisi jawaban 2. Pengawas melakukan uji petik pilihan jawaban	v			
52	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	52	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	52	Moral hazard petugas pengolahan	52	Kurangnya pengawasan pengolahan dari petugas pengawas pengolahan	Kesalahan entri tidak sesuai dokumen	Risiko Operasional	V		2	4	13	1. Memberikan teguran kepada pengolah yang melakukan moral hazard 2. Pengecekan hasil entri paska komputerisasi 3. Pengawasan pengolahan lebih intensif 4.	v			

53	Terwujudnya penyediaan Insight dan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	53	195 - SUSENAS MODUL KOR DAN KONSUMSI (TERMASUK SERUTI)	53	Isian tidak lengkap, tidak wajar, tidak konsisten	53	Petugas kurang probing	Data tidak berkualitas	Risiko Operasional	V		4	4	19	pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas pemeriksa .	v			

54	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	54	170 - SURVEI HARGA KONSUMEN	54	Kualitas data tidak sesuai harapan	54	Kurangnya pengawasan dan supervisi dari proses entri data	Data yang dihasilkan tidak berkualitas	Risiko Operasional	V		3	3	14	Membangun web monitoring yang mudah diakses dan dapat dilakukan secara berkala	v			
55	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	55	170 - SURVEI HARGA KONSUMEN	55	Petugas pendataan kurang memahami konsep	55	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	Data inkonsisten	Risiko Kebijakan	V		4	3	16	memberikan materi pembelajaran secara mandiri di WA Group		v		
56	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	56	23 - INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	56	data ekstrem	56	Petugas tidak cermat dalam memeriksa isian dokumen	Data tidak bisa dibandingkan	Risiko Operasional	V		4	3	16	melakukan pra rekon dan rekonsiliasi data daerah	v			
57	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	57	171 - SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR	57	Kualitas data tidak sesuai harapan	57	Operator kurang teliti saat entry	Data yang dihasilkan tidak berkualitas	Risiko Operasional	V		4	3	16	Monitoring secara berkala sebelum web entry ditutup	v			
58	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	58	190 - SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN	58	Ada kendala program pada saat entri hasil pendataan	58	Program entri belum optimal di awal tahun	Entry data terhambat	Risiko Operasional	V		4	3	16	Konsultasi dengan BPS Provinsi Jawa Barat	v			
59	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	59	190 - SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN	59	Perusahaan menolak untuk di cacah	59	Perusahaan lambat dalam mengisi data	Perusahaan lambat dan lama mengisi	Risiko Operasional	V		4	3	16	Mengefektifkan monitoring dan evaluasi	v			
60	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	60	185 - SURVEI POLA DISTRIBUSI BARANG	60	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	60	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	Data tidak berkualitas	Risiko Kebijakan	V		4	4	19	memberikan materi pembelajaran secara mandiri di WA Group		v		

61	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	61	185 - SURVEI POLA DISTRIBUSI BARANG	61	Aplikasi pengolahan tidak tersedia tepat waktu	61	Hasil analisis data dan olah data terlambat	Pelaksanaan pencacahan/pengolahan menjadi terlambat	Risiko Operasional	V		4	3	16	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara berjenjang		v		
62	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	62	185 - SURVEI POLA DISTRIBUSI BARANG	62	Perusahaan menolak untuk di cacah	62	Perusahaan lambat dalam mengisi data	Perusahaan lambat dan lama mengisi	Risiko Reputasi	V		4	2	12	Bekerja dengan lebih efektif dan menambah ekstra waktu di luar jam kerja		v		
63	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	63	192 - SURVEI POLA USAHA NON PERTANIAN	63	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	63	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	Data tidak berkualitas	Risiko Kebijakan	V		4	4	19	memberikan materi pembelajaran secara mandiri di WA Group		v		
64	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	64	192 - SURVEI POLA USAHA NON PERTANIAN	64	Aplikasi pengolahan tidak tersedia tepat waktu	64	Keterlambatan dalam proses sebelumnya	Pelaksanaan pencacahan/pengolahan menjadi terlambat	Risiko Operasional	V		4	3	16	Menggunakan kuesioner kertas terlebih dahulu sembari menunggu program lancar	v			
65	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	65	27 - KOMPILASI DATA STATISTIK JASA TRANSPORTASI	65	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	65	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	Data tidak berkualitas	Risiko Kebijakan	V		5	2	15	memberikan materi pembelajaran secara mandiri di WA Group		v		
66	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	66	27 - KOMPILASI DATA STATISTIK JASA TRANSPORTASI	66	Bahan publisitas kiriman dari pusat atau provinsi datang terlambat	66	Hasil analisis data dan olah data terlambat 1.	Keterlambatan rilis publikasi	Risiko Reputasi	V		4	4	19	Bekerja dengan lebih efektif dan menambah ekstra waktu di luar jam kerja 1.		v		
67	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	67	193 - SURVEI JASA PENUNJANG ANGKUTAN (PERGUDANGAN DAN KURIR)	67	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	67	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	Data tidak berkualitas	Risiko Kebijakan	V		3	4	17	Melakukan Briefing Petugas dan membuat WAG untuk diskusi mengenai permasalahan dan solusi mengenai jasa penunjang angkutan.	v			

68	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	68	193 - SURVEI JASA PENUNJANG ANGKUTAN (PERGUDANGAN DAN KURIR)	68	Aplikasi pengolahan tidak tersedia tepat waktu	68	Keterlambatan dalam proses sebelumnya	Pelaksanaan pencacahan/pengolahan menjadi terlambat	Risiko Operasional	V		3	3	14	Menggunakan kuesioner kertas terlebih dahulu sembari menunggu program lancar	v			
69	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	69	165 - STATISTIK LEMBAGA KEUANGAN	69	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	69	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	Data tidak berkualitas	Risiko Kebijakan	V		3	3	14	memberikan materi pembelajaran secara mandiri di WA Group 1.		v		
70	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	70	165 - STATISTIK LEMBAGA KEUANGAN	70	Aplikasi pengolahan tidak tersedia tepat waktu	70	Keterlambatan dalam proses sebelumnya	Pelaksanaan pencacahan/pengolahan menjadi terlambat	Risiko Operasional	V		3	3	14	Menggunakan kuesioner kertas terlebih dahulu sembari menunggu program lancar han..	v			
71	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	71	188 - SURVEI STATISTIK BADAN USAHA DAN PASAR MODAL	71	Petugas pencacahan/pengolahan tidak/kurang memahami metodologi serta konsep dan definisi kegiatan sensus/survey	71	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	Data tidak berkualitas	Risiko Kebijakan	V		3	3	14	memberikan materi pembelajaran secara mandiri di WA Group		v		
72	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	72	188 - SURVEI STATISTIK BADAN USAHA DAN PASAR MODAL	72	Aplikasi pengolahan tidak tersedia tepat waktu	72	Keterlambatan dalam proses sebelumnya	Pelaksanaan pencacahan/pengolahan menjadi terlambat	Risiko Operasional	V		3	3	14	Menggunakan kuesioner kertas terlebih dahulu sembari menunggu program lancar	v			
73	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Distribusi	73	224 - SENSUS EKONOMI 2026 (TAHAP PERSIAPAN)	73	Keterlambatan penyusunan strategi sosialisasi dan publisitas SE2026	73	Fokus yang terbagi dengan tugas lain dalam persiapan SE2026, sehingga strategi sosialisasi tidak menjadi prioritas utama. 1.	Pemahaman dan partisipasi pelaku usaha terhadap kegiatan SE2026 rendah.	Risiko Operasional	V		4	3	16	Menyusun rencana kerja dan jadwal penyusunan strategi sosialisasi dan publisitas 1.	v			

74	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Distribusi	74	224 - SENSUS EKONOMI 2026 (TAHAP PERSIAPAN)	74	Anggaran publisitas SE2026 terbatas	74	Terbatasnya anggaran dilihat dari besarnya kegiatan dan luasnya jangkauan sasaran publisitas.	Jangkauan sosialisasi dan efektivitas penyebaran informasi terkait SE2026 kepada masyarakat terbatas.	Risiko Kebijakan	V		3	4	17	Melakukan optimalisasi penggunaan anggaran dengan pemilihan media sosialisasi yang efektif dan kolaborasi dengan stakeholder untuk mendukung publisitas SE2026 1.	v			
75	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Distribusi	75	224 - SENSUS EKONOMI 2026 (TAHAP PERSIAPAN)	75	Publisitas SE2026 kurang efektif dan efisien, tidak menjangkau seluruh pelaku usaha	75	Publisitas hanya menyentuh segmentasi tertentu saja	Kesadaran dan partisipasi pelaku usaha dalam pendataan SE2026 rendah.	Risiko Operasional	V		4	4	19	Melakukan diversifikasi media dan metode sosialisasi serta peningkatan kerja sama dengan stakeholder untuk memperluas jangkauan publisitas SE2026.	v			
76	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	76	224 - SENSUS EKONOMI 2026 (TAHAP PERSIAPAN)	76	Kualitas perlengkapan petugas buruk	76	Keterbatasan anggaran	tingkat kepercayaan responden menurun	Risiko Kebijakan	V		4	3	16	Membekali petugas dengan surat tugas dan tanda pengenal serta ijin ke pemangku wilayah sebelum kelapangan		v		
77	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	77	169 - SURVEI USAHA JASA DAN PARIWISATA	77	Kualitas data tidak sesuai harapan	77	Kurangnya pengawasan proses entri FASIH harus dicek ke data entry LK	Data inkonsisten	Risiko Operasional	V		4	3	16	Membangun monitoring yang mudah diakses dan dapat dilakukan secara berkala	v			

78	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	78	169 - SURVEI USAHA JASA DAN PARIWISATA	78	Petugas pendataan kurang memahami konsep	78	tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas	Data inkonsisten	Risiko Kebijakan	V		4	3	16	memberikan materi pembelajaran secara mandiri di WA Group		v		
79	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	79	18 - IBS TAHUNAN	79	Pelatihan jarang sekali dilakukan, sangat dimungkinkan ada petugas baik lama maupun baru belum mendapatkan pelatihan	79	Ketersediaan anggaran pelatihan maupun briefing yang bisa dikatakan tidak ada.	Petugas seringkali mengalami kesalahan pengisian kuesioner, sehingga pengawas seringkali me-*reject* isian kuesioner ataupun konfirmasi ulang baik ke petugas ataupun ke responden langsung.	Risiko Operasional	V		3	3	14	Melakukan briefing dan membuat WAG untuk Koordinasi dan komunikasi mengenai konsep definisi dan permasalahan di lapangan	v			
80	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan Yang Berkualitas	80	LPTB	80	Petugas lupa terhadap konsep definisi dari isian kuesioner	80	karena tidak ada briefing sebelum pelaksanaan	Data yang dihasilkan tidak sesuai konsep dan definisi.	Risiko Operasional	V		3	3	14	1. Petugas membaca dulu buku pedoman kegiatan survei tersebut sebelum pelaksanaan lapangan. 2. Organik mendampingi petugas sewaktu pelaksanaan lapangan		v		
81	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas	81	89 - PENDATAAN STATISTIK PERTANIAN TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN METODE KERANGKA SAMPEL AREA	81	Pelatihan jarang sekali dilakukan, sangat dimungkinkan ada petugas baik lama maupun baru belum mendapatkan pelatihan	81	Ketersediaan anggaran.	Akurasi data yang masih kurang optimal.	Risiko Operasional	V		4	3	16	Melakukan briefing dan membuat WAG untuk Koordinasi dan komunikasi mengenai konsep definisi dan permasalahan di lapangan	v			
82	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	82	17 - IBS BULANAN	82	Responden tidak bisa diwawancara langsung karena isian kuesioner harus antar bagian/ bidang dan petugas tidak bisa menemui semua bidang terkait	82	Kompleksitas isian/rincian pertanyaan.	Keterlambatan pengisian kuesioner survei.	Risiko Operasional	V		3	3	14	1. Petugas menghubungi kontak person perusahaan tersebut 2. Petugas menjelaskan maksud dan tujuan survei 3. Kuesioner ditinggal dengan perjanjian kapan kuesioner bisa selesai. 1.	v			

83	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	83	179 - SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER DAN UPDATING DIREKTORI	83	Isian dokumen tidak lengkap dan atau non respon	83	Responden tidak mau memberikan data yang sifatnya rahasia usaha.	Kelengkapan data tidak terpenuhi.	Risiko Operasional	V		4	3	16	1. Petugas menghubungi kontak person perusahaan tersebut 2. Petugas menjelaskan maksud dan tujuan survei 3. Petugas bersama pengawas memberikan pendekatan persuasif dan menjelaskan pentingnya data yang di kumpulkan. 1.	v			
84	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	84	19 - IMK TAHUNAN	84	Responden tidak mengisi kuesioner secara lengkap dan konsistensi tidak terjaga	84	Keengganan responden dalam memberikan jawaban apa adanya secara lengkap, petugas pendata tidak memprobing ulang isian kuesioner yang telah diisi.	Kelengkapan data tidak terpenuhi.	Risiko Operasional	V		4	3	16	Mengkonfirmasi ulang ke responden.	v			
85	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	85	20 - IMK TRIWULANAN	85	Petugas pengisi data perusahaan tidak paham dengan konsep dan definisi Kuesioner	85	Kurangnya penjelasan pengisian kuesioner kepada responden.	Akurasi data yang masih kurang optimal.	Risiko Operasional	V		4	3	16	1. Petugas menghubungi kontak person perusahaan tersebut 2. Petugas menjelaskan maksud dan tujuan survei 3. Petugas menjejelaskan cara pengisian dokumen .	v			
86	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	86	17 - IBS BULANAN	86	Responden tidak memiliki data sesuai dengan format kuesioner	86	Format laporan mengenai data di perusahaan tidak ada yang baku.	Kelengkapan data tidak terpenuhi.	Risiko Operasional	V		4	3	16	Menjelaskan pengisian sesuai Format Dokumen dari BPS dan memberikan Soft Copy Dokumen untuk mempermudah pengisian.		v		
87	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	87	18 - IBS BULANAN	87	Responden memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pengisian kuesioner	87	Kesibukan responden dan kurang pengertiannya responden akan pentingnya data.	Timelag pendataan berjalan lambat, berdampak pada penyajian angka rilis ataupun tabulasi/publikasi.	Risiko Operasional	V		4	3	16	Berkomunikasi berkali-kali ke responden dan menjelaskan pentingnya data yang di kumpulkan.		v		

88	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	88	179 - SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER DAN UPDATING DIREKTORI	88	Perusahaan kurang jujur memberikan informasi	88	Kekhawatiran perusahaan akan penyalahgunaan data yang diberikan.	Kelengkapan data tidak terpenuhi.	Risiko Operasional	V		4	3	16	Menjelaskan maksud dan tujuan serta pendataan ini hanya untuk menghitung Indikator sebagai dasar evaluasi kebijakan pemangku terkait.		v		
89	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	89	179 - SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER DAN UPDATING DIREKTORI	89	Sulitnya bertemu dengan responden	89	Kesibukan responden dan kurang pengertiannya responden akan pentingnya data.	Timelag pendataan berjalan lambat, berdampak pada penyajian angka rilis ataupun tabulasi/publikasi.	Risiko Operasional	V		4	3	16	1. Petugas menghubungi kontak person perusahaan tersebut 2. Petugas menjelaskan maksud dan tujuan survei 3. Petugas bersama pengawas memberikan pendekatan persuasif dan menjelaskan pentingnya data yang di kumpulkan.		v		
90	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas	90	180 - SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN	90	Ada kemungkinan blok sensus yang potensial tidak tercover karena saat updating belum tanam	90	Kondisi alam dan kebiasaan responden.	Under coverage populasi yang dicatat.	Risiko Operasional	V		4	3	16	Berkomunikasi dengan BPS Provinsi mengenai permasalahan dan di lapangan serta melibatkan petugas untuk memantau di lapangan.	v			
91	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas	91	180 - SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN	91	Terlewatnya pelaksanaan ubinan	91	1. Kurangnya koordinasi dengan responden, 2. Waktu panen yang bisa bergeser.	Respon rate berkurang	Risiko Operasional	V		3	3	14	Menjelaskan kepada Responden, tentang pentingnya data yang di kumpulkan dan menjalin komunikasi dengan responden.		v		
92	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas	92	VN Horti dan VP Horti	92	Updating perusahaan hortikultura tidak berjalan baik	92	Tumpang tindih dengan kegiatan lainnya.	Timelag pendataan berjalan lambat, berdampak pada penyajian angka rilis ataupun tabulasi/publikasi.	Risiko Operasional	V		3	3	14	Mencari petugas lapangan yang kegiatan nya tidak terlalu banyak sehingga pelaksanaan di lapangan bisa berjalan dengan baik.		v		
93	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	93	231 - SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR (STPIM)	93	Kuesioner hilang di responden	93	Kurang pedulinya responden.	Timelag pendataan berjalan lambat, berdampak pada penyajian angka rilis ataupun tabulasi/publikasi.	Risiko Operasional	V		3	3	14	Memberikan kuesioner kepada responden atau memberikan soft copy nya lewat email atau WA.	v			

94	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	94	STPIM - SKIM	94	Responden tidak memiliki data sesuai dengan format kuesioner	94	Format laporan mengenai data di perusahaan tidak ada yang baku.	Data yang dihasilkan tidak sesuai konsep dan definisi.	Risiko Operasional	V		3	3	14	Menjelaskan pengisian sesuai Format Dokumen dari BPS dan memberikan Soft Copy Dokumen untuk mempermudah pengisian.	v			
95	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan Yang Berkualitas	95	LTU dan LTT	95	Updating perusahaan peternakan tidak berjalan baik	95	Tumpang tindih dengan kegiatan lainnya.	Timelag pendataan berjalan lambat, berdampak pada penyajian angka rilis ataupun tabulasi/publikasi.	Risiko Operasional si	V		3	3	14	Mencari petugas lapangan yang kegiatan nya tidak terlalu banyak sehingga pelaksanaan di lapangan bisa berjalan dengan baik.		v		
96	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	96	20 - IMK TRIWULANA N	96	Peta BS yang digunakan adalah peta SE 2016, yang waktu nya sudah cukup lama, sehingga muatannya sudah tidak *update* dengan kondisi sekarang.	96	Frame survei masih mengacu pada kondisi 2016.	Cakupan populasi yang banyak berubah	Risiko Operasional	V		3	3	14	Tetap mengikuti Peta BS dari SE 2016 dan menyesuaikan dengan batas2 di dalam peta.	v			
97	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	97	20 - IMK TRIWULANA N	97	Penulisan kegiatan usaha yang kurang jelas	97	Pemahaman petugas mengenai penjabaran kegiatan usaha.	Akurasi data yang masih kurang optimal.	Risiko Operasional	V		4	3	16	Menginformasikan kepada petugas untuk menanyakan proses kegiatan industri yang di lakukan dan menjelaskan dengan jelas di dalam dokumen untuk mempermudah pengisian KBLI		v		
98	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	98	176 - SURVEI KONSTRUKSI	98	Sulitnya mencari keberadaan perusahaan	98	Beberapa perusahaan tidak mencantumkan papan nama.	Timelag pendataan berjalan lambat, berdampak pada penyajian angka rilis ataupun tabulasi/publikasi.	Risiko Operasional	V		3	3	14	Petugas datang sesuai alamat yang tertera dan menanyakan ke pengurus SLS stempat atau tokoh masyarakat setempat terkait keberadaaan perusahaan	v			

99	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	99	176 - SURVEI KONSTRUKSI)	99	Banyak perusahaan hasil matching tidak ditemukan di alamat yang tertera di daftar sampel yang didapatkan di asosiasi dan unit pelayanan terpadu daerah serta	99	Alamat perusahaan hanya di tas, di lapangan hanya titip alamat.	Timelag pendataan berjalan lambat, berdampak pada penyajian angka rilis ataupun tabulasi/publikasi.	Risiko Operasional	V		4	3	16	Mengidentifikasi perusahaaan lewat pengutipan data perusahaan kepada instansi terkait (Disnaker, DPMPTSP, Disdagperin) dan Update perusahaan.	v			
100	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	100	176 - SURVEI KONSTRUKSI	100	Sulit mencari responden sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk survei konstruksi tahunan dan triwulanan.	100	Perusahaan dengan kualifikasi Menengah Besar masih sedikit.	Akurasi data yang masih kurang optimal.	Risiko Operasional	V		3	3	14	Diusahakan untuk mencarai sesuai kualifikasi yang ditentukan. Jika sudah tidak di temukan sesuai kulaifikasi lalu turun ke kualifikasi di bawahnya.	v			
101	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	101	176 - SURVEI KONSTRUKSI	101	Petugas kurang memahami tujuan dari kegiatan survei konstruksi.	101	Minimnya briefing petugas.	Akurasi data yang masih kurang optimal.	Risiko Operasional	V		4	3	16	Melakukan briefing dan membuat WAG untuk Koordinasi dan komunikasi mengenai konsep definisi dan permasalahan di lapangan	v			
102	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	102	176 - SURVEI KONSTRUKSI	102	Perusahaan yang terkait tidak paham dengan cara/isian kuesioner	102	Form kuesioner tidak familiar di perusahaan.	Akurasi data yang masih kurang optimal.	Risiko Operasional	V		4	3	16	Menjelaskan pengisian sesuai Format Dokumen dari BPS , menjelaskan maksud dari setiap pertanyaan dan memberikan Soft Copy Dokumen untuk mempermudah pengisian.		v		
103	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	103	231 - SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR (STPIM)	103	Sebagian responden ada yang menolak untuk diwawancarai	103	Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya data, responden seringkali disurvei dan tidak ada dampak langsungnya.	Respon rate berkurang.	Risiko Operasional	V		4	3	16	1. Petugas menghubungi kontak person perusahaan tersebut 2. Petugas menjelaskan maksud dan tujuan survei 3. Petugas bersama pengawas memberikan pendekatan persuasif dan menjelaskan pentingnya data yang di kumpulkan.	v			

104	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri dan PEK Yang Berkualitas	104	231 - SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR (STPIM)	104	Responden terindikasi menjawab sekenanya	104	Kebosanan responden.	Akurasi data yang masih kurang optimal.	Risiko Operasional	V		4	3	16	1. Petugas menghubungi kontak person perusahaan tersebut 2. Petugas menjelaskan maksud dan tujuan survei 3. Petugas bersama pengawas memberikan pendekatan persuasif dan menjelaskan pentingnya data yang di kumpulkan.	v			
105	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas	105	UPB UTL)	105	Untuk pencacahan UPB UTL yang menggunakan moda CAPI, seringkali jawaban dari responden tidak konsisten.	105	Data yang tidak tercatat di responden. .	Akurasi data yang masih kurang optimal.	Risiko Operasional	V		3	3	14	Dilaksanakan pemeriksaan Dokumen yang lebih teliti serta konfirmasi ke petugas dan responden	v			
106	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas	106	UPB UTL	106	Untuk pencacahan UPB UTL kadang-kadang responden meminta diberikan dokumen/ kuesioner hard copy untuk diisi sendiri.	106	Data yang tidak tercatat di responden. .	Akurasi data yang masih kurang optimal.	Risiko Operasional	V		3	3	14	Petugas pencacah berkonsultasi kepada pengawasnya agar data menjadi clean dan bisa submit	v			
107	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas	107	KSA dan Ubinan)	107	ada kemungkinan sub segmen KSA tidak bisa dijangkau	107	terjadinya banjir karena curah hujan tinggi ataupun ditutupnya akses oleh pemilik lahan yang terkena sampel KSA, atau moral hazard petugas pencacah	Akurasi data yang masih kurang optimal. .	Risiko Operasional	V	V	3	3	14	Melakukan komunikasi dan membuat berita acara serta membuat surat pernyataan petugas pencacah mengenai permasalahan di lapangan	v			
108	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	108	PENYUSUNAN PUBLIKASI PDRB INDONESIA TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA 2010 = 100)	108	Publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha Triwulanan yang terbit tidak tepat waktu	108	1. Ket erlambatan penerimaan data dari stakeholder 2. Beb an kerja SDM yang tinggi menjelang publikasi	1. Jadwal rilis publikasi yang tidak tepat waktu 2. Resiko kesalahan pada publikasi meningkat .	Risiko Reputasi	V	V	3	4	17	1. Menyed iakan template permintan data yang diperlukan 2. Mem bagi tugas secara merata pada setiap anggota tim	v			

109	Tersedianya Publikasi / Laporan Statistik Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	109	143 - PENYUSUNAN PDB TAHUNAN DAN TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010 = 100	109	Data dasar dari lapangan usaha tidak lengkap atau terlambat masuk	109	1. Tim penyusun PDRB Lapangan usaha tidak bekerja tepat waktu 2. Stakeholder eksternal terlambat dalam memberikan data sekunder 3. Kesalahan pengiriman data saat rekonsiliasi dengan BPS Provinsi 4. Fenomena ekonomi yang dikumpulkan kurang lengkap	Penghitungan PDRB akan kurang akurat	Risiko Reputasi		V	3	4	17	Untuk data yg tidak tersedia secara detil, maka penghitungan PDRB lapangan usaha akan menggunakan data yang disediakan oleh Provinsi	v			
110	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Fungsi Nerwilis	110	233 - SURVEI KHUSUS NERACA PRODUKSI TAHUNAN (SKNP)	110	Data dasar dari lapangan usaha tidak lengkap atau terlambat masuk	110	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal	1. Menghambat organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik 2. Menghambat organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	Risiko Reputasi	V	V	4	4	19	1. Pengawasan/Supervisi ke lapangan 2. Monitoring Berkala	v			
111	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Fungsi Nerwilis	111	137 - PENYUSUNAN NILAI TAMBAH LAPANGAN USAHA BARANG TRIWULANAN 2010 = 100 (SKTNP BARANG)	111	Respon Rate SKTNP barang tidak sesuai target	111	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal	1. Menghambat organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik 2. Menghambat organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	Risiko Reputasi	V	V	3	4	17	1. Pengawasan/Supervisi ke lapangan 2. Monitoring Berkala	v			
112	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Fungsi Nerwilis	112	138 - PENYUSUNAN NILAI TAMBAH LAPANGAN USAHA JASA TRIWULANAN 2010 = 100 (SKTNP JASA)	112	Respon Rate SKTNP Jasa tidak sesuai target	112	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal	1. Menghambat organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik 2. Menghambat organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	Risiko Reputasi	V	V	3	4	17	1. Pengawasan/Supervisi ke lapangan 2. Monitoring Berkala	v			

113	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Fungsi Nerwilis	113	PENDATAAN SURVEI PDAM	113	Pemasukan data PDAM tidak sesuai target	113	Stakeholder tidak memberikan data tepat waktu	Target Jadwal tidak terpenuhi	Risiko Reputasi		V	4	4	19	1. Melakukan follow up kepada stakeholder terkait 2. Pengawasan ke lapangan	v			
114	Tersedianya Dokumen Administrasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Statistik Neraca Produksi yang sesuai pedoman dan tata aturan pemerintah	114	DOKUMEN ADMINISTRASI NERACA PRODUKSI	114	1. Keterlambatan pencairan honor. 2.Kesalahan perhitungan honor	114	1. Dokumen persyaratan kurang lengkap. 2. Kesalahan dalam membuat volume pekerjaan pada SPJ.	1. Menurunnya motivasi petugas 2. Munculnya keluhan. .	Risiko Reputasi	V		2	2	7	1. Melakukan pengecekan dokumen lebih awal 2. Melakukan verifikasi silang oleh minimal dua petugas	v			
115	Tersedianya Publikasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yang dihasilkan yang bersumber dan aktivitas Statistik yang menerapkan Standard Akurasi	115	PENYUSUNAN PUBLIKASI STATISTIK DAERAH KOTA BEKASI	115	Publikasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yang dihasilkan yang bersumber dan aktivitas Statistik yang menerapkan Standard Akurasi tidak terbit tepat waktu	115	1. Tim penyusun publikasi tidak bekerja tepat waktu 2. Dukungan data dari external tidak tepat waktu .	Kinerja Organisasi bisa tidak mencapai target	Risiko Reputasi	V		1	4	8	Melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan Publikasi Statistik Daerah Kota Bekasi	v			
116	Tersedianya Rilis Data Nerwilis yang terbit tepat waktu	116	237 - DATA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	116	BRS IPM BPS Kota Bekasi tidak terbit tepat waktu	116	1. Tim penyusun berita resmi statistik tidak bekerja tepat waktu 2. Data final untuk bahan penyusun berita resmi statistik terlambat diterima dari BPS Provinsi	BRS IPM tidak berkualitas atau tidak terbit tepat waktu .	Risiko Reputasi	V		1	5	20	Menyusun jadwal penyusunan berita resmi statistik IPM .	v			
117	Tersedianya Upload BRS tepat waktu	117	237 - DATA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	117	Upload BRS IMP BPS Kota Bekasitidak tepat waktu	117	1. Tim penyusun berita resmi statistik tidak bekerja tepat waktu 2. Data final untuk bahan penyusun berita	BRS IPM tidak berkualitas atau tidak terbit tepat waktu .	Risiko Reputasi	V		1	5	20	Menyusun jadwal penyusunan berita resmi statistik IPM .	v			

resmi

							statistik terlambat diterima dari BPS Provinsi												
118	Tersedianya Publikasi dan Laporan Statistik Neraca Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan yang terbit tepat waktu	118	130 - PENYUSUNAN PDRB PENGELUARAN TRIWULANAN DAN TAHUNAN	118	Publikasi PDRB Menurut Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan tidak terbit tepat waktu	118	1. Tim penyusun PDRB Pengeluaran tidak bekerja tepat waktu 2. Terlambatnya stakeholder eksternal dalam memberikan data sekunder 3. Kesalahan pengiriman data saat rekonsiliasi dengan BPS Provinsi 4. Fenomena ekonomi yang dikumpulkan kurang lengkap	1. Data yang dihasilkan tidak berkualitas 2. Kinerja organisasi tidak mencapai target	Risiko Reputasi	V	V	1	5	20	1. Untuk data yang tidak tersedia menggunakan pendekatan dari data yang diberikan oleh BPS Provinsi 2. Melakukan follow up ke PIC Dinas/Instansi terkait data sekunder	v			
119	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Statistik Neraca Pengeluaran	119	SURVEI KHUSUS LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA TRIWULANAN (SKLNPT)	119	Respon rate SKLNPT tidak mencapai target	119	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal	1. Menghambat organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik 2. Kinerja organisasi tidak mencapai target.	Risiko Reputasi	V	V	3	4	17	1. Untuk data yang tidak tersedia menggunakan pendekatan dari data yang diberikan oleh BPS Provinsi 2. Melakukan follow up ke PIC Dinas/Instansi terkait data sekunder	v			
120	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Statistik Neraca Pengeluaran	120	SURVEI KHUSUS PERUSAHAAN SWASTA NON FINANSIAL (SKPS)	120	Respon rate SKPS tidak mencapai target	120	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal	1. Menghambat organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik 2. Kinerja organisasi tidak mencapai target.	Risiko Reputasi	V	V	3	4	17	1. Pengawasan/Supervisi ke lapangan 2. Monitoring Berkala	v			
121	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Statistik Neraca Pengeluaran	121	SURVEI KHUSUS STUDI PENYUSUNAN PERUBAHAN INVENTORI (SKSPPI)	121	Respon rate SKSPPI tidak mencapai target	121	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal.	1. Menghambat organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik 2. Kinerja organisasi tidak mencapai target	Risiko Reputasi	V	V	3	4	17	1. Pengawasan/Supervisi ke lapangan 2. Monitoring Berkala	v			

122	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Statistik Neraca Pengeluaran	122	SURVEI KHUSUS STRUKTUR INPUT PEMERINTAH (SKSIP)	122	Respon rate SKSIP tidak mencapai target	122	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal	1. Menghambat organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik 2. Kinerja organisasi tidak mencapai target	Risiko Reputasi	V	V	3	4	17	1. Pengawasan/Supervisi ke lapangan 2. Monitoring Berkala	v			
123	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Statistik Neraca Pengeluaran	123	SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	123	Respon rate PMTB tidak mencapai target	123	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal	1. Menghambat organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik 2. Menghambat organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	Risiko Reputasi	V	V	3	4	17	1. Pengawasan/Supervisi ke lapangan 2. Monitoring Berkala	v			
124	Tercapainya target respon rate survei berbasis usaha di Statistik Neraca Pengeluaran	124	SURVEI UPDATING DIREKTORI	124	Respon rate Updating Direktori tidak mencapai target	124	1. Responden menolak untuk memberikan datanya 2. Mitra statistik yang tidak bekerja sesuai jadwal	1. Menghambat organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik 2. Kinerja organisasi tidak mencapai target	Risiko Reputasi	V	V	3	4	17	1. Pengawasan/Supervisi ke lapangan 2. Monitoring Berkala	v			
125	Tersedianya Rilis Data Nerwilis yang terbit tepat waktu	125	PENYUSUNAN KEGIATAN SNAPSHOOT TRIWULANAN	125	Data PDRB Pengeluaran yang dihasilkan tidak berkualiitas	125	1. Minimnya berita mengenai fenomena ekonomi yang terjadi di wilayah Kota Bekasi 2. Tim pengumpul data snapshoot triwulanan tidak bekerja sesuai dengan jadwal	1. Menghambat organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik 2. Kinerja organisasi tidak mencapai target	Risiko Reputasi	V	V	3	4	17	Melakukan pengumpulan data fenomena ekonomi yang bersumber dari berbagai media secara berkala	v			
126	Tersedianya Dokumen Administrasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran yang sesuai pedoman dan tata aturan pemerintah	126	DOKUMEN ADMINISTRASI NERACA PENGELUARAN	126	1. Keterlambatan pencairan honor. 2.Kesalahan perhitungan honor	126	1. Dokumen persyaratan kurang lengkap. 2. Kesalahan dalam membuat volume pekerjaan pada SPJ.	1. Menurunnya motivasi petugas 2. Munculnya keluhan.	Risiko Reputasi	V		2	2	7	1. Melakukan pengecekan dokumen lebih awal 2. Melakukan verifikasi silang oleh minimal dua petugas	v			

127	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	127	94 - PENGEMBANGAN DESAIN SENSUS DAN SURVEI	127	Pemeriksaan pengajuan perubahan wilayah administrasi, masters BS dan SLS terlambat dilakukan	127	Kecamatan terlambat melaporkan perubahan SLS/BS pada aplikasi FRS .	Master wilayah administrasi, Blok sensus, SLS tidak termtakhirkan sesuai dengan kondisi lapangan saat ini	Risiko Operasional	V		3	4	17	Melakukan monitoring secara rutin ke BPS daerah	v			

128	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	128	94 - PENGEMBANGAN DESAIN SENSUS DAN SURVEI	128	Penyusunan publikasi tidak dapat diselesaikan tepat waktu	128	Tumpang tindih pekerjaan .	Publikasi tidak dirilis sesuai waktu yang ditetapkan	Risiko Reputasi	V		2	4	13	Membuat jadwal dan matrik pekerjaan lebih detail dan terencana .	v			
129	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	129	197 - PEMUTAKHIRAN KERANGKA GEOSPASIAL DAN MUATAN WILKERSTAT	129	Progress monitoring tidak uptodate	129	Kecamatan tidak mengirimkan progress terbaru secara rutin .	Penilaian kinerja rendah .	Risiko Operasional	V		3	4	17	Mengingatkan kab/kota secara rutin	v			
130	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	130	197 - PEMUTAKHIRAN KERANGKA GEOSPASIAL DAN MUATAN WILKERSTAT	130	Pengawasan ke Kecamatan tidak Maksimal	130	Anggaran Pengawasan ke Kecamatan minim .	Sampel wilayah untuk cek kualitas hasil pendataan petugas minim	Risiko Operasional	V		3	4	17	Melaksanakan pengawasan secara online	v			
131	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	131	197 - PEMUTAKHIRAN KERANGKA GEOSPASIAL DAN MUATAN WILKERSTAT	131	Terdapat anomali data hasil pendataan muatan wilkerstat	131	Petugas kurang memahami konsep dan definisi .	Data yang dihasilkan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya	Risiko Reputasi	V		4	5	24	Melakukan pengawasan kualitas data secara ketat mulai dari pelaksanaan pendataan lapangan	v			
132	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	132	197 - PEMUTAKHIRAN KERANGKA GEOSPASIAL DAN MUATAN WILKERSTAT	132	Adanya gap/overlap peta spasial yang dihasilkan	132	Kesalahan dalam melakukan digitasi batas wilayah kab/kec/desa/BS/ SLS	Terdapat wilayah yang ganda dipetakan atau tidak terpetakan sama sekali	Risiko Operasional	V		4	5	24	Melakasanakan rekonsiliasi batas wilayah	v			
133	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	133	197 - PEMUTAKHIRAN KERANGKA GEOSPASIAL DAN MUATAN WILKERSTAT	133	Peta Digital tidak dapat diupload	133	Server Geospasial System mengalami masalah	Keterlambatan waktu penyelesaian perbaikan batas SLS/Non SLS	Risiko Operasional	V		3	4	17	Melakukan koordinasi dengan BPS RI	v			
134	Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima	134	154 - PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI	134	Keterbatasan jaringan internet di kantor	134	Jaringan Internet bermasalah	Kinerja tidak sesuai harapan	Risiko Operasional		V	2	5	21	Layanan penanganan gangguan dari penyedia internet dilakukan dengan cepat	v			

135	Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima	135	154 - PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI	135	Keterbatasan jaringan internet di kantor .	135	Jaringan internet tidak stabil .	Koneksi jaringan lambat	Risiko Operasional		V	2	5	21	Pengecekan permasalahan dengan evaluasi jaringan internet	v			
136	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	136	239 - SUVEI KEBUTUHAN DATA (SKD)	136	SKD tidak rilis tepat waktu	136	Target Responden tidak tercapai	Publikasi SKD tidak terbit	Risiko Operasional		V	2	2	7	Setiap pengguna layanan yang datang ke PST potensi diambil sebagai responden SKD	v			
137	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pe merintah Daerah	137	70 - PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL	137	Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Surat Rekomendasi harus menyerahkan hasil kegiatannya dalam bentuk softcopy sesuai UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	137	Keterbatasan Media Penyimpanan Dokumentasi Hasil Kegiatan Statistik Sektoral	Layanan Rekomendasi Statistik Mengalami Keterbatasan Media Penyimpanan Dokumen	Risiko Operasional	V		2	2	7	- Melakukan pemantauan utilisasi kapasitas media penyimpanan data dan Merencanakan pengadaan penambahan perangkat media penyimpanan data via cloud	v			
138	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pe merintah Daerah	138	Layanan Konsultasi Statistik	138	Pelayanan Konsultasi kepada Kelompok (Organisasi/Instansi/Perusahaan) dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan Aplikasi Ruang Meeting Virtual	138	Munculnya Aplikasi Ruang Meeting Virtual yang memungkinkan untuk digunakan dalam Pelayanan Konsultasi secara Grup/Kelompok 1.	Layanan Konsultasi Mengalami Keterbatasan Media	Risiko Kebijakan	V		3	1	4	Menambah media pelayanan online dengan memanfaatkan whatsapp, website, dan virtual meeting dan Sosialisasi tentang kegiatan layanan konsultasi online secara grup melalui medsos (IG, FB TikTok)	v			

139	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	139	Layanan Konsultasi Statistik	139	Pengguna Layanan menyampaikan permintaan pelayanan diluar jam pelayanan	139	Permintaan pelayanan diajukan diluar jam pelayanan	Layanan Konsultasi Mengalami Keterbatasan Waktu Layanan Sesuai Jam Layanan	Risiko Kebijakan		V	4	2	12	Membuat pesan penjawab otomatis untuk setiap permintaan yang masuk diluar jam pelayanan yang berisi informasi bahwa pelayanan akan direspon di jam pelayanan hari berikutnya dan Menambahkan frequently asked question	v			
140	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	140	Layanan Perpustakaan)	140	Pengguna Layanan menganggap semua data tersedia di BPS	140	Pengguna Layanan menganggap semua data tersedia di BPS	Layanan Perpustakaan Mengalami Keterbatasan Ketersedian Data	Risiko Reputasi		V	4	3	16	Mensosialisasikan Daftar Informasi Publik yang tersedia di BPS melalui beragam kanal seperti website, Sistem Informasi pelayanan Publik, dan media sosial.	v			
141	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	141	Layanan Rekomendasi Statistik	141	Status Permintaan Layanan Rekomendasi Statistik tidak dapat berubah menjadi selesai karena tidak ada tindak lanjut dari pengguna layanan sampai batas waktu yang telah ditetapkan	141	Pemohon Rekomendasi Statistik tidak merespon tindak lanjut dari hasil pemeriksaaan rancangan kegiatan statistik sosial yang diajukan untuk mendapatkan Rekomendasi Kegiatan Statistik	Layanan Rekomendasi Statistik Mengalami Kendala Dalam Penyelesaian Proses 1.	Risiko Kepatuhan		V	4	2	12	Melakukan pemantauan status permintaan layanan yang ada dan berkoordinasi dengan Walidata di Pemerintah Provinsi jawa Barat untuk proses tindak lanjutnya	v			
142	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	142	Layanan Rekomendasi Statistik)	142	Transfer pengetahuan dari Jawara Data yang lama kepada Jawara Data yang baru tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik bahkan ditengarai kerap tidak terjadi. Ini dapat berakibat pada bertambahnya waktu untuk penyusunan usulan	142	Pergantian Jawara Data yang mengelola Kegiatan Statistik dan Data Statistik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Layanan Rekomendasi Statistik Mengalami Kendala Dalam Penyelesaian Proses	Risiko Kebijakan		V	2	2	7	Membuat Rencana Kerja pembinaan statistik dengan Walidata di Pemerintah Provinsi jawa Barat, Menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral secara berkala dan Melakukan pendampingan/asistensi penyusunan rekomendasi statistik	v			

				rekomendasi															

					kegiatan statistik perangkat daerah karena minimnya pengetahuan Jawara Data yang baru tersebut terkait penyusunan rekomendasi statistik.													
143	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	143	Layanan Perpustakaan	143	Tidak tersedia penjelasan untuk setiap nilai yang digunakan pada skala nilai di SKD sehingga penilaian dapat menjadi bias atau miss interpretasi dan Nama survei yang dipakai untuk penilaian kepuasan adalah Survei Kebutuhan Data sehingga menimbulkan kesalahpahaman dari Pengguna Layanan	143	Keterbatasan pemahaman Pengguna Layanan dalam memberikan penilaian di Survei Kebutuhan Data	Penilaian SKD mengalami penurunan 1.	Risiko Reputasi		V	4	3	16	Mensosialisasikan Survei Kebutuhan Data melalui website	v			
144	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	144	Layanan Perpustakaan	144	Pengguna Layanan Online tidak mendapatkan notifikasi untuk memberikan penilaian terhadap layanan yang telah diberikan	144	Pengguna Layanan Perpustakaan Online jarang yang memberikan penilaian SKD	Respon Rate SKD Rendah	Risiko Operasional		V	2	2	7	Pemantauan Daftar Pengguna Layanan dan mengirimkan link pengisian SKD melalui email pengguna layanan	v			
145	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	145	Layanan Perpustakaan	145	Pengguna Layanan mengajukan Permintaan Produk Statistik melalui email/whatsapp untuk Produk Statistik yang telah tersedia pada situs resmi secara publik	145	Pengguna menginginkan layanan instan terutama untuk Layanan Permintaan Data 1.	Konsumen Data Menginingkan Data Sesegera Mungkin 1.	Risiko Operasional		V	4	3	16	Mensosialisasikan Penggunaan Sistem Pelayanan Publik yang tersedia melalui media sosial	v			

146	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	146	Layanan Perpustakaan	146	Publikasi dapat diakses secara online	146	Adanya Surat Edaran BPS tentang Peniadaan Pencetakan Publikasi 1.	Konsumen Data Mencari Publikasi Tercetak	Risiko Kebijakan	V		2	2	7	Melakukan Alih Media Publikasi Lama, Melengkapi Publikasi Terbaru di OPAC dan Mensosialisasikan OPAC melalui media sosial	v			

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BEKASI
Jl.Rawa Tembaga 1 No.6, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp/fax : (021) 88953987
Email : bps3275@bps.go.id